

TATANIAGA GULA PASIR DI SUMATERA UTARA

SKRIPSI

Oleh:

**OKTAVYA MARGARETHA MANIK
020304042/SEP**



**DEPARTEMEN SOSIAL EKONOMI PERTANIAN
FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
MEDAN
2007**

TATANIAGA GULA PASIR DI SUMATERA UTARA

SKRIPSI

Oleh:

**OKTAVYA MARGARETHA MANIK
020304042/SEP**

**Skripsi Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh
Gelar Sarjana di Fakultas Pertanian
Universitas Sumatera Utara**



**DEPARTEMEN SOSIAL EKONOMI PERTANIAN
FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
MEDAN
2007**

Judul Skripsi : TATANIAGA GULA PASIR DI SUMATERA UTARA
Nama : OKTAVYA MARGARETHA MANIK
NIM : 020304042
Departemen : Sosial Ekonomi Pertanian
Program Studi : Agribisnis

Disetujui Oleh,
Komisi Pembimbing

Ir. Luhut Sihombing, MP

Ketua

Ir. Lily Fauzia, M.Si.

Anggota

Mengetahui,

Ir. Lily Fauzia, M.Si.

Ketua Departemen Sosial Ekonomi Pertanian

Tanggal Lulus :

RINGKASAN

Oktavya Margaretha Manik (020304042/SEP) dengan judul skripsi “**Tataniaga Gula pasir di Sumatera Utara**” dengan studi kasus propinsi Sumatera Utara. Penelitian dilakukan pada bulan April 2007 dan dibimbing oleh Bapak **Ir. Luhut Sihombing, MP** sebagai ketua komisi pembimbing dan Ibu **Ir. Lily Fauzia, M.Si** sebagai anggota komisi pembimbing.

Bahan baku untuk pengolahan gula putih yang paling umum digunakan adalah batang tanaman tebu (*Saccharum officinarum* L) atau umbi tanaman bit gula (*Beta vulgaris*). Untuk kepentingan pengolahan gula, batang tanaman tebu dianggap tersusun atas nira tebu dan ampas. Tujuan dari proses pengolahan tebu adalah untuk memisahkan gula atau sukrosa yang terkandung didalam batang tebu atau umbi tanaman bit gula tersebut sebanyak-banyaknya.

Menurut keputusan Menteri Perindustrian Dan Perdagangan Republik Indonesia nomor: 61/MPP/KEP/2/2004 tentang perdagangan antar pulau pasal 1 gula pasir kristal putih (*Plantation White Sugar*) adalah gula yang dapat dikonsumsi langsung tanpa diproses lebih lanjut.

Tataniaga merupakan pemasaran atau distribusi, yaitu kegiatan ekonomi yang berfungsi membawa atau menyampaikan barang dari produsen ke konsumen. Biaya tataniaga terbentuk sebagai konsekuensi logis dari pelaksanaan fungsi-fungsi tataniaga. Aspek pemasaran/tataniaga memang disadari sebagai aspek yang sangat penting. Bila mekanisme pemasaran berjalan baik, maka semua pihak yang terlibat akan diuntungkan. Oleh karena itu peranan lembaga tataniaga yang terdiri dari produsen, tengkulak, pedagang pengumpul, eksportir, importir, menjadi amat penting. Lembaga tataniaga ini khususnya bagi negara berkembang yang dicirikan dengan lemahnya pemasaran hasil pertanian akan menentukan mekanisme pasar.

Rendahnya produksi gula ini akibat teknologi tanam yang kurang memperoleh perhatian sehingga kesenjangan produksi dan areal lahan bertambah besar. Kesenjangan bukan saja terdapat pada produksi dan areal tanam, namun juga pada produksi dan konsumsi, sehingga dalam rangka pengamanan stok gula nasional, pemerintah harus mengimpor gula setiap tahun, yang sejak tahun 1982 meningkat terus.

Pemerintah pernah menerapkan berbagai kebijakan yang secara langsung ataupun tidak langsung, berpengaruh terhadap industri gula Indonesia. Kebijakan pemerintah tersebut mempunyai dimensi yang cukup luas, dari kebijakan input dan produksi, distribusi dan kebijakan harga.

Metode sampling yang digunakan adalah *secara purposive*, yaitu penentuan daerah dan sample penelitian dipilih berdasarkan pada pertimbangan dan tujuan tertentu. Metode analisis yang digunakan yaitu metode deskriptif. Dari hasil penelitian diperoleh hasil sebagai berikut:

1. Saluran tataniaga gula pasir di Sumatera Utara terdiri atas 2 bentuk saluran. Bentuk saluran pertama terdiri atas: Pabrik Gula (PG) Sei Semayang dan PG Kuala Mada. Bagian pemasaran PTP Nusantara II (Persero) → Distributor → Grosir → Pedagang Eceran → Konsumen Akhir. Bentuk saluran tataniaga gula pasir di Sumatera Utara berasal dari Importir

Terdaftar (IT)/luar Propinsi Distributor→Grosir→Pedagang Eceran→Konsumen Akhir.

2. a. Jumlah produksi gula pasir di Sumatera Utara yang berasal dari PG Kuala Madu dan PG Sei Semayang selama tahun 2002-2005 produksi rata-rata sebesar 27.345,96 ton.
- b. Jumlah konsumsi gula pasir Sumatera Utara selama tahun 2002-2005 secara rata-rata adalah 147866,59 Ton dengan jumlah penduduk rata-rata sebesar 12.083.967 jiwa dengan rata-rata pertumbuhan konsumsi 4,67 persen pertahun. Jumlah konsumsi ini jauh di atas jumlah produksi gula Sumatera Utara.
3. Jumlah gula pasir yang ditawarkan di Sumatera Utara merupakan jumlah total dari gula produksi PTP. Nusantara II (Persero), stok awal, dari propinsi lain dan impor. Jumlah gula pasir yang ditawarkan selama tahun 2002-2005 meningkat. Jumlah gula pasir yang ditawarkan dipengaruhi oleh harga. Selama tahun 2002-2005 tingkat harga gula pasir terus meningkat.
4. Gula pasir merupakan suatu komoditi yang menyangkut kepentingan banyak pihak, sehingga kebijakan-kebijakan yang terkait dengan gula pasir harus menggambarkan kepentingan pihak-pihak seperti petani tebu, pabrik gula, konsumen gula dan kepentingan pemerintah. Kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah terkait dengan segi produksi, pengolahan, dan pemasarannya. Peranan dikeluarkannya kebijakan-kebijakan tersebut bertujuan untuk menjamin kelancaran pengadaan dan penyaluran gula pasir serta peningkatan pendapatan petani.
5. Upaya-paya yang dapat dilakukan pemerintah untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi dalam tata niaga gula pasir: (1) Jumlah konsumsi gula pasir yang lebih besar dari jumlah produksi maka pemerintah melakukan impor gula pasir untuk memenuhi kekurangan produksi agar kebutuhan gula pasir dapat terpenuhi. (2) Pemerintah juga bekerja sama dengan pihak terkait seperti produsen dan distributor untuk melakukan operasi pasar disaat terjadi gejolak harga yang melampaui tinggi. (3) Peningkatan kelancaran distribusi gula pasir ke daerah-daerah dengan menyusun sistem pengawasan dan mekanisme distribusi ke daerah, koordinasi dan kerjasama dengan pemerintah Kabupaten/Kota dan asosiasi pengusaha dalam penyaluran gula pasir.

RIWAYAT HIDUP

Oktavya Margaretha Manik, dilahirkan di Medan pada tanggal 7 Oktober 1984, anak kelima dari enam bersaudara dari Bapak **Aden Manik** dan Ibu **Josephine Siahaan**.

Adapun pendidikan formal yang pernah ditempuh penulis adalah:

- Tahun 1990 masuk SD RK Katolik bersubsidi di Diski Kabupaten Deli Serdang tamat Tahun 1996.
- Tahun 1996 masuk SMP ST. Thomas 2 di Binjai tamat tahun 1999.
- Tahun 1999 masuk SMU Negeri 1 Binjai di Binjai tamat tahun 2002.
- Tahun 2002 menempuh pendidikan di Universitas Sumatera Utara, Fakultas Pertanian, Departemen Sosial Ekonomi Pertanian melalui jalur SPMB.

Mengikuti Praktek Kerja lapangan di Desa Janji Kecamatan Dolok Sanggul Kabupaten Humbang Hasundutan, Propinsi Sumatera Utara, tahun 2006.

DAFTAR ISI

	Hlm
RINGKASAN	i
RIWAYAT HIDUP	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABLE	vii
DAFTAR GAMBAR	viii
DAFTAR LAMPIRAN	ix
PENDAHULUAN	1
Latar Belakang	1
Identifikasi Masalah	4
Tujuan Penelitian	5
Kegunaan Penelitian	5
TINJAUAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI	6
Tinjauan Pustaka	6
Landasan Teori	16
Kerangka Pemikiran	27
Hipotesis Penelitian	29
METODE PENELITIAN	30
Metode Penentuan Daerah Penelitian	30
Metode Penentuan Sample	30
Metode Pengumpulan Data	31
Metode Analisis Data	32
Defenisi dan Batasan Operasional	33
Defenisi	33
Batasan Operasional	34
DESKRIPSI DAERAH PENELITIAN DAN KARAKTERISTIK SAMPLE	35
Deskripsi Daerah Penelitian	35
Luas Dan Letak Geografis Sumatera Utara	35
Penduduk Sumatera Utara	36
Karakteristik Pabrik Gula Sei Semayang	37
Karakteristik Pabrik Gula Kuala Madu	37

HASIL	38
Saluran Tataniaga Di Daerah Penelitian	38
Jumlah Produksi Dan Konsumsi Gula Pasir Di Sumatera Utara Tahun 2002-2005	39
Jumlah Produksi Gula Pasir Di Sumatera Utara Tahun 2002-2005	39
Jumlah Konsumsi Gula Pasir Di Sumatera Utara Tahun 2002-2005	42
Hubungan Antara Supply/Penawaran Gula Pasir Dengan Harga Eceran Di Sumatera Utara	43
Peran Pemerintah Dan Lembaga Swasta DalamPenyaluran Gula Pasir Di Sumatera Utara	44
Upaya-Upaya Yang Dilakukan Pemerintah Untuk Memecahkan Permasalahan Tataniaga Gula Pasir	45
PEMBAHASAN	48
Saluran Tataniaga Di Daerah Penelitian	48
Jumlah Produksi Dan Konsumsi Gula Pasir Di Sumatera Utara Tahun 2002-2005	49
Jumlah Produksi Gula Pasir Di Sumatera Utara Tahun 2002-2005	49
Jumlah Konsumsi Gula Pasir Di Sumatera Utara Tahun 2002-2005	50
Hubungan Antara Supply/Penawaran Gula Pasir Dengan Harga Eceran Di Sumatera Utara	50
Peran Pemerintah Dan Lembaga Swasta DalamPenyaluran Gula Pasir Di Sumatera Utara	52
Upaya-Upaya Yang Dilakukan Pemerintah Untuk Memecahkan Permasalahan Tataniaga Gula Pasir	53
KESIMPULA DAN SARAN	55
Kesimpulan	55
Saran	56

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

No	Judul	Hlm
1.	Beberapa Kebijakan Pemerintah Yang Berkaitan Dengan Industri Gula	11
2.	Spesifikasi Pengumpulan Data	32
3.	Jumlah Penduduk Dan Rumah Tangga Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2005	37
4.	Produksi Gula Pasir Sei Semayang Tahun 2002-2005	41
5.	Produksi Gula Pasir Kuala Madu Tahun 2002-2005	41
6.	Produksi Gula Pasir Sumatera Utara Tahun 2002-2005	41
7.	Konsumsi Gula Pasir Sumatera Utara Tahun 2002-2005	42
8.	Ketersediaan Gula pasir di Sumatera Utara tahun 2002-2005	44
9.	Perkembangan Harga Rata-Rata Gula Pasir Tahun 2002-2005	44

DAFTAR GAMBAR

No	Judul	Hlm
1.	Skema Jalur Tataniaga Tebu	13
2.	Skema Jalur Tataniaga Gula Pasir	15
3.	Kurva Penawaran	18
4.	<i>Floor Price</i>	24
5.	<i>Ceilling Price</i>	25
6.	Skema Kerangka Pemikiran	29
7.	Skema Tataniaga Gula Pasir Di Daerah Penelitian	38
8.	Produksi Gula Pasir Sumatera Utara Tahun 2002-2005	41
9.	Konsumsi Gula Pasir Di Sumatera Utara 2002-2005	43



DAFTAR LAMPIRAN

No	Judul	Hlm
1.	Produksi Gula Pasir Kuala Madu Tahun 2002	59
2.	Produksi Gula Pasir Kuala Madu Tahun 2003	59
3.	Produksi Gula Pasir Kuala Madu Tahun 2004	59
4.	Produksi Gula Pasir Kuala Madu Tahun 2005	59
5.	Produksi Gula Pasir Sei Semayang Tahun 2002	60
6.	Produksi Gula Pasir Sei Semayang Tahun 2003	60
7.	Produksi Gula Pasir Sei Semayang Tahun 2005	60
8.	Konsumsi Gula Pasir Sumatera Utara Tahun 2002	61
9.	Konsumsi Gula Pasir Sumatera Utara Tahun 2003	62
10.	Konsumsi Gula Pasir Sumatera Utara Tahun 2004	63
11.	Konsumsi Gula Pasir Sumatera Utara Tahun 2005	64
12.	Ketersediaan Gula Pasir di Sumatera Utara Tahun 2002-2005	65
13.	Perkembangan Harga Eceran Gula Pasir Di Ibukota Kabupaten/Kota Se Sumatera Utara Tahun 2002	66
14.	Perkembangan Harga Eceran Gula Pasir Di Ibukota Kabupaten/Kota se Sumatera Utara tahun 2003	67
15.	Perkembangan Harga Eceran Gula Pasir Di Ibukota Kabupaten/Kota se Sumatera Utara tahun 2004	68
16.	Perkembangan Harga Eceran Gula Pasir Di Ibukota Kabupaten/Kota se Sumatera Utara tahun 2005	69

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara pertanian artinya, pertanian memegang peranan penting dari keseluruhan perekonomian nasional. Hal ini ditunjukkan dari banyaknya penduduk atau tenaga kerja yang hidup dan bekerja pada sektor pertanian, atau produk nasional yang berasal dari pertanian (Mubyarto, 1989: 12).

Pertanian Indonesia adalah pertanian tropika yang langsung dipengaruhi oleh garis khatulistiwa, ada dua faktor alam lain yang ikut memberi corak pertanian Indonesia. Pertama, bentuknya sebagai negara kepulauan dan kedua, topografinya yang bergunung-gunung (Mubyarto, 1989: 6).

Walaupun pada kenyataannya tanaman-tanaman beriklim subtropik dan iklim sedang seperti teh, kopi, kina, sayur-sayuran dan buah-buahan menjadi tanaman penting di Indonesia, namun hasil pertanian Indonesia yang penting adalah tanaman iklim panas seperti padi, jagung, tebu, karet dan kopra (Mubyarto, 1989: 16).

Pertanian dalam arti luas mencakup: 1. Pertanian rakyat atau yang disebut dalam arti sempit 2. Perkebunan (termasuk dalamnya perkebunan rakyat dan perkebunan besar) 3. Kehutanan 4. Peternakan 5. Perikanan (Mubyarto, 1989: 16).

Perkebunan di Indonesia meliputi luas 2.225.645 Ha pada tahun 1973 dimana sebagian besar adalah milik negara. Umumnya perkebunan ini terdapat di daerah-daerah yang bermusim panas di dekat khatulistiwa (Mubyarto, 1989: 21).

Ada beberapa jenis tanaman yang diusahakan di perkebunan di Indonesia, baik yang diusahakan oleh perkebunan negara, swasta, maupun perkebunan rakyat

yaitu kelapa sawit, karet, kakao, kopi, teh, dan tebu. Salah satu areal untuk penanaman tebu adalah Sumatera Utara.

Tebu atau *Saccharum officinarum* termasuk keluarga rumput-rumputan. Mulai dari pangkal sampai ujung batangnya mengandung air gula dengan kadar mencapai 20%. Air gula inilah yang kelak yang dibuat kristal-kristal gula atau gula pasir (<http://warintek.progresio.or.perkebunan>).

Produksi tebu PT Perkebunan Nusantara II pada tahun tebu giling 2005/2006 ini meningkat dibandingkan tahun lalu atau mencapai 1,041 juta tahun yang dihasilkan dari 12.954 Ha lahan tebu milik BUMN itu dan hasil Tebu Rakyat Intensifikasi (TRI). Hasil tebu sebanyak 1.041.181,77 ton itu merupakan produksi 13 kebun masing-masing kebun Sei Semayang, Kelambir Lima, Helvetia, Klumpang, Sentis, Sampali, Bulu Cina, Kuala Madu, Kuala Bingei, Tandam Hilir, Tandam, Batang Serangan, dan Tanjung Jati. Sebanyak 1.041.181,77 ton tebu itu masing-masing dihasilkan kebun sendiri sebanyak 1.000.455,07 ton yang merupakan hasil panen dari areal seluas 12.366,16 Ha dan sisanya 40.726,70 ton merupakan dari kebun TRI seluas 588,36 Ha (www.pemprovsu.go.id/lengkap).

Menurut keputusan Menteri Perindustrian Dan Perdagangan Republik Indonesia nomor: 61/MPP/KEP/2/2004 tentang perdagangan antar pulau pasal 1 gula pasir kristal putih (*Plantation White Sugar*) adalah gula yang dapat dikonsumsi langsung tanpa diproses lebih lanjut.

Perkembangan produksi gula yang cenderung turun tidak bisa juga terlepas dari kinerja pabrik gula (PG) dan berdampak pula pada keberadaan PG. Berdasarkan data sampai tahun 2004, jumlah PG yang beroperasi cenderung menurun baik dari segi jumlah maupun hari giling. Sampai tahun 2004, PG yang

beroperasi adalah 58 PG yang terdiri dari 51 BUMN dan 7 PG swasta . Lokasi PG menyebar di 8 propinsi dengan Jawa Timur sebagai sentra utama yaitu 32 PG yang aktif. Jawa Tengah dan Jawa Barat masing-masing memiliki 8 dan 5 PG. Untuk luar Jawa, Lampung menempati peringkat pertama dengan 5 PG dan Sulawesi Selatan, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Gorontalo masing-masing 3 PG, 2PG, 1PG, dan 1PG (www.ipard/art_perkebunan).

Tataniaga merupakan pemasaran atau distribusi, yaitu kegiatan ekonomi yang berfungsi membawa atau menyampaikan barang dari produsen ke konsumen. Biaya tataniaga terbentuk sebagai konsekuensi logis dari pelaksanaan fungsi-fungsi tataniaga. Komponen biaya tataniaga terdiri dari semua jenis pengeluar yang dikorbankan oleh setiap *middleman*/lembaga tataniaga atas jasa modalnya dan jasa tenaganya dalam menjalankan aktivitas pemasaran tersebut. Setelah dikelompokkan menurut harga beli dan harga jual, biaya-biaya pemasaran menurut fungsi tataniaga dan *margin* keuntungan dari tiap lembaga maka disebut juga *price spread*. Bila angka-angka *price spread* dipersenkan terhadap harga beli konsumen maka diperoleh *share margin*. Biaya tataniaga yang tinggi akan membuat sistem tataniaga kurang/tidak efisien (Ull and Kohl, 1980: 23-24).

Aspek pemasaran/tataniaga memang disadari sebagai aspek yang sangat penting. Bila mekanisme pemasaran berjalan baik, maka semua pihak yang terlibat akan diuntungkan. Oleh karena itu peranan lembaga tataniaga yang terdiri dari produsen, tengkulak, pedagang pengumpul, eksportir, importir, menjadi amat penting. Lembaga tataniaga ini khususnya bagi negara berkembang yang dicirikan dengan lemahnya pemasaran hasil pertanian akan menentukan mekanisme pasar (Soekartawi, 1991: 117).

Kenyataannya, kelemahan dalam sistem pertanian di negara berkembang termasuk Indonesia adalah kurangnya perhatian dalam bidang pemasaran. Fungsi-fungsi pemasaran/tataniaga seperti pembelian, *sorting (grading)*, penyimpanan, pengangkutan dan pengelolaan sering tidak berjalan seperti yang diharapkan, sehingga efisiensi tataniaga menjadi lemah. Keterampilan mempraktekkan unsur-unsur manajemen juga demikian. Belum lagi dari segi kurangnya penguasaan informasi pasar sehingga kesempatan-kesempatan ekonomi menjadi sulit untuk dicapai (Soekartawi, 2002: 1).

1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang tersebut maka dapat dirumuskan beberapa masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk saluran tataniaga gula pasir di Propinsi Sumatera Utara?
2. Bagaimana perkembangan jumlah produksi dan konsumsi gula pasir pertahun di Propinsi Sumatera Utara?
3. Bagaimana hubungan antara *supply*/penawaran gula pasir dan harga eceran di Propinsi Sumatera Utara?
4. Apa peranan pemerintah dan lembaga swasta dalam penyaluran gula pasir di Propinsi Sumatera Utara?
5. Upaya-upaya apa saja yang dilakukan pemerintah untuk memecahkan masalah yang dihadapi dalam tataniaga gula pasir di Sumatera Utara?

1.3. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bentuk saluran tataniaga gula pasir di Propinsi Sumatera Utara.
2. Untuk mengetahui perkembangan jumlah produksi dan konsumsi gula pasir pertahun di Propinsi Sumatera Utara.
3. Untuk mengetahui hubungan antara *supply*/penawaran gula pasir dan harga eceran di Propinsi Sumatera Utara.
4. Untuk mengetahui peranan pemerintah dan lembaga swasta dalam penyaluran gula pasir di Propinsi Sumatera Utara.
5. Untuk mengetahui upaya-upaya yang dilakukan pemerintah untuk memecahkan masalah yang dihadapi dalam tataniaga gula pasir di Sumatera Utara.

1.4. Kegunaan penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini adalah:

1. Sebagai bahan masukan bagi pihak yang berkaitan dengan gula pasir serta persoalan-persoalan yang dihadapi dalam tataniaga gula pasir dan usaha-usaha memecahkannya.
2. Sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan kepada orang-orang yang melakukan usaha penjualan gula pasir.

II. TINJAUAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI

2.1. Tinjauan Pustaka

Bahan baku untuk pengolahan gula putih yang paling umum digunakan adalah batang tanaman tebu (*Saccharum officinarum* L) atau umbi tanaman bit gula (*Beta vulgaris*). Batang tanaman tebu yang masih segar hampir seluruhnya (99%) tersusun atas unsur karbon (C), hidrogen (H), dan oksigen (O). Dari sejumlah itu, kira-kira 75% diantaranya dalam bentuk air (H₂O), dan sisanya dalam bentuk bahan kering. Untuk kepentingan pengolahan gula, batang tanaman tebu dianggap tersusun atas nira tebu dan ampas. Tujuan dari proses pengolahan tebu adalah untuk memisahkan gula atau sukrosa yang terkandung didalam batang tebu atau umbi tanaman bit gula tersebut sebanyak-banyaknya (Tjokroadikoesoemo dan Baktir, 1984: 8-9).

Batang tanaman tebu merupakan sumber gula. Namun demikian rendemen/persentase gula yang dihasilkan hanya berkisar 10-15 %. Sisa pengolahan batang tebu adalah:

1. Tetes tebu (molase) yang diperoleh dari tahap pemisahan kristal gula dan masih mengandung gula 50-60 %, asam amino dan mineral. Tetes tebu adalah bahan baku bumbu masak MSG, gula cair dan arak.
2. Putik dan tebu yang diperoleh dari penebangan digunakan untuk pakan ternak dalam bentuk silase, pelet dan wafer.
3. Ampas tebu merupakan hasil sampingan dari proses ekstrasi cairan tebu. Dimanfaatkan sebagai bahan bakar pabrik, bahan industri kertas, *particle board* dan media untuk budidaya jamur atau dikompakkan untuk pupuk.

4. Blotong yang merupakan hasil sampingan dari proses penjernihan. Bahan organik ini dipakai sebagai pupuk.

(warintek.progresio.or.id/perkebunan).

Bila tebu dipotong, akan terlihat serat-serat dan terdapat cairan yang manis. Serat dan kulit batang biasanya disebut sabut dengan persentase sekitar 12,5% dari bobot tebu. Cairannya disebut nira dengan persentase 87,5%. Nira terdiri dari air dan bahan kering. Bahan kering tersebut ada yang larut dan ada pula yang tidak larut dalam nira (www.ipard.com/art_perkebunan) .

Pabrik gula sangat berperan dalam menentukan saat penebangan. Penentuan waktu ini berdasarkan analisis kemasakan dan jadwal penggilingan. Saat bunga akan muncul, tanaman menghasilkan produk tertinggi. Kemasakan tebu ditentukan pada musim kemarau, karena air hujan akan menurunkan rendemen (Tim Penulis, 1992: 63).

Gula merupakan salah satu dari sembilan bahan pokok. Semua lapisan masyarakat membutuhkannya. Begitu banyaknya orang yang membutuhkan gula maka harga gula harus dicapai oleh semua orang dan masih memberikan keuntungan bagi petani (Tim Penulis, 1992: 99).

Gula kristal yang dihasilkan pabrik gula pada umumnya terdiri dari berbagai jenis, sesuai dengan permintaan pasaran, terutama pasaran untuk ekspor. Namun, sejak akhir Perang Dunia II, jumlah jenis gula sangat berkurang, ekspor hampir tidak ada meskipun pasaran internasional sangat baik, dan konsumsi dalam negeri meningkat. Pasaran internasional inilah yang pada pokoknya menentukan jumlah jenis gula yang diproduksi pabrik pada saat itu. Produksi rendah dalam tahun 1959 dan tahun-tahun sesudahnya dikatakan sebagai akibat faktor iklim,

irigasi yang kurang baik, serangan hama, tersedianya pupuk yang tidak tepat waktu, dan petani tebu yang kurang menguasai teknologi menanam tebu yang benar. Turunnya produksi diakibatkan pula oleh faktor teknologi produksi gula yang sudah usang serta peralatan yang sudah tua (Moerdokusumo, 1993: 2-3).

Rendahnya produksi gula ini akibat teknologi tanam yang kurang memperoleh perhatian sehingga kesenjangan produksi dan areal lahan bertambah besar. Kesenjangan bukan saja terdapat pada produksi dan areal tanam, namun juga pada produksi dan konsumsi, sehingga dalam rangka pengamanan stok gula nasional, pemerintah harus mengimpor gula setiap tahun, yang sejak tahun 1982 meningkat terus. Jenis gula yang diimpor biasanya terdiri dari gula pasir dari tebu, rafinade, HS, atau yang juga dikenal sebagai *raw sugar* dan gula farmasi (Moerdokusmo, 1993: 11).

Tataniaga gula pasir seluruhnya diatur oleh pemerintah. Gula sebagai sumber energi yang relatif murah serta pengadaannya yang menguasai hajat hidup sebagian besar masyarakat Indonesia menjadi alasan utama pemerintah memberikan monopoli tataniaganya kepada Bulog. Di Indonesia, impor gula ditangani oleh Bulog sebagai penyalur tunggal gula dalam negeri. Akan tetapi, Bulog boleh menunjuk perusahaan lain untuk melaksanakan impor gula (Moerdokusmo, 1993 : 12).

Sesuai dengan negara tujuan, secara umum dikenal tiga jenis gula utama, yaitu gula mentah, gula merah (tidak termasuk gula jawa, aren, dsb.), dan gula putih (termasuk gula rafinade, SHS).

- Gula Metah

Yang dimaksudkan dengan gula mentah adlah sejenis gula merah yang berbutir tidak terlampau halus, terutama diperuntukkan sebagai bahan baku pabrik gula rafinade. Gula mentah ini meliputi HS, NA, dan Muscovado. Jenis Muscovado sudah sejak lama tidak lagi digunakan sebagai bahan baku pabrik rafinade.

- Gula merah

Jenis gula merah meliputi beberapa jenis gula sebagaimana yang dijelaskan berikut ini:

Gula utama atau HS sebagai gula mentah untuk Korea, misalnya, harus berwarna lebih hitam daripada HS untuk pasaran Jepang. Menghendaki untuk bahan rafinadanya HS yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Ketersaingan sekitar 30,0 ton/tekanan saringan
- b. Uji afinasi (mudah dicuci dan disentrifus)
- c. Warna dan kekeruhan
- d. Spesifikasi butiran gula
- e. Paling sedikit 80% kristal harus dalam batas ukuran 0,7-1,0 mm
- f. Jumlah butiran halus tidak melebihi 1%.

Gula mentah serupa yang terdapat di pasaran Eropa dan Inggris adalah HS dengan polarisasi $96,5^0V-97,25^0V$ dan kadar bahan bukan gula antara 2,5 dan 3% yang disebut *Nieuw Assortiment* (NA). Jenis NA tidak digolongkan khusus menurut tipe warna, tetapi kadar SO_2 tidak boleh melebihi 70mg/kg.

Muscodo digolongkan dalam Java Assortiment dan termasuk golongan gula merah yang mempunyai polasisasi minimal $96,5^0V$ dan tipe warna 12-14.

Sebagai bahan mentah gula rafinade, muscovado tidak lagi banyak disukai. Meskipun polarisasinya sama dengan NA, pada dasarnya kedua jenis gula tersebut berlainan, terutama sifat fisika dan kimianya. Muscavado dibuat dengan cara mencampurkan HS dengan karamel untuk memperendah warna sampai bawah tipe warna 14. Dengan demikian, muscovado lebih mudah dikeringkan dan lebih tahan lama daripada NA.

- Gula putih

Dalam jenis gula putih termasuk jenis gula dengan tipe warna standar 25 ke atas dengan polarisasi minimal $99,5^0V$, misalnya SHS dan gula rafinade. Menurut kebiasaan, selain menyebutkan jenis gula, dinyatakan juga cara pembuatan serta asal dan nama pabriknya. Untuk konsumsi dalam negeri, Bulog tidak menentukan spesifikasi kualitas lain. Secara resmi, untuk SHS tidak ada pemebagian atas dasar spesifikasi butir yang ketat. Namun, sehubungan dengan negara tujuan dan keinginan pemebili, BP3G menetapkan ketentuan ukuran butiran gula SHS dengan menggunakan enam fraksi standar ayakan Tyler sebagai kriteria utama. Ayakan 6 fraksi tersebut mempunyai lubang persegi dengan ukuran masing-masing:

Fraksi 1	: - 1,65 mm
Fraksi 2	: 1,65-1,17 mm
Fraksi 3	: 1,17-0,83 mm
Fraksi 4	: 0,83-0,59 mm
Fraksi 5	: 0,59-0,30 mm
Fraksi 6	: - 0,30 mm

Untuk mendapatkan kristal yang sesuai dengan spesifikasi buturan kristal yang diminta, maka hasil kristalisasi dalam unit operasi masakan harus dikoreksi dengan menggunakan ayakan yang dipadukan. Untuk memenuhi spesifikasi tersebut, minimal 50% dan maksimal 70% kristal harus jatuh dalam satu fraksi. Hasil ini diperoleh dengan menggunakan dua jenis ayakan kasar dan halus sebagai berikut:

1. Untuk menghasilkan SHS kasar dipakai ayakan kasar kasa besi 9 x 9 dengan lubang 2,22 (menurut 2 x 2 mm) dan tebal kawat 0,6 mm. Kapasitas ayakan tidak melebihi 50-25 kuintal/jam untuk mendapatkan rendemen ayakan yang baik.
2. Untuk menghasilkan SHS normal dipakai ayakan yang menurut teori harus mempunyai lubang 1,5 x 1,5 mm, yang berarti penggunaan ayakan kasa besi berukuran 12 x 12 lubang/inci dan tebal kawat 0,45 mm. Kapasitas ayakan tidak melebihi 20 kuintal/jam.
3. Untuk memperoleh SHS halus digunakan ayakan kasar kasa besi berukuran 14 x 14 dengan lubang 1,4 x 1,4 mm. Kapasitas dibatasi maksimal 8-10 kuintal/jam.

(Moerdokusumo, 1993: 27).

Pemerintah pernah menerapkan berbagai kebijakan yang secara langsung ataupun tidak langsung, berpengaruh terhadap industri gula Indonesia. Kebijakan pemerintah tersebut mempunyai dimensi yang cukup luas, dari kebijakan input dan produksi, distribusi dan kebijakan harga.

Tabel 1. Beberapa Kebijakan Pemerintah Yang Berkaitan Dengan Industri Gula

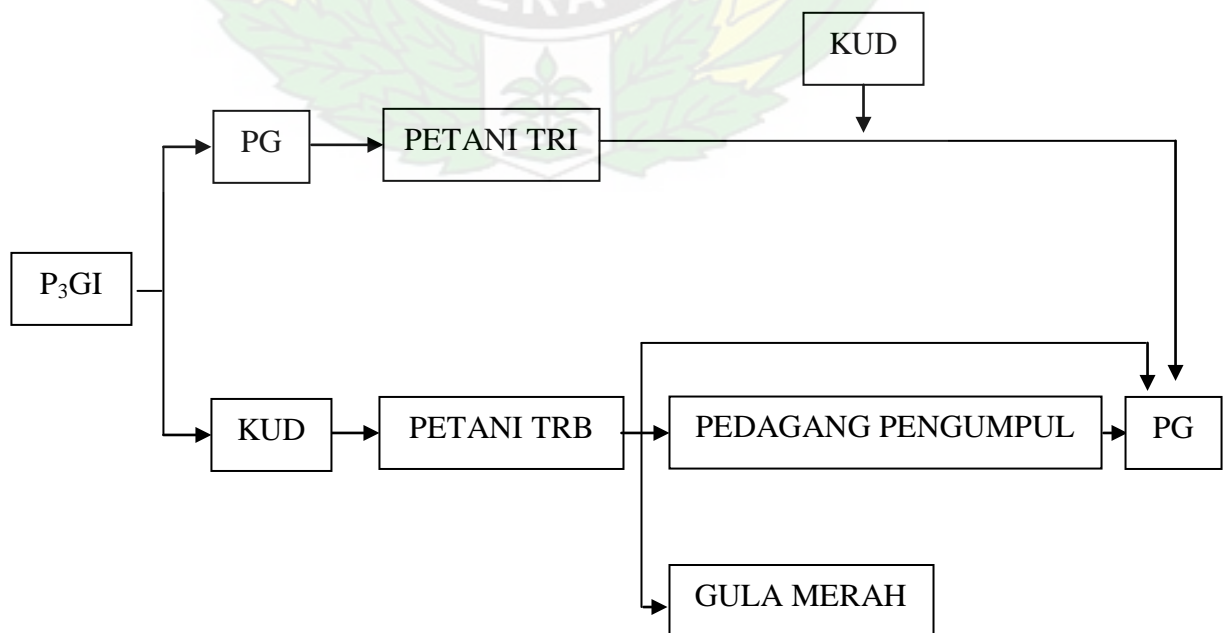
Nomor SK/Kepres/Kepmen	Perihal	Tujuan
Kepres no.43/ 1971, 14 juli 1971	Pengadaan, penyaluran, dan pemasaran gula	Menjaga kestabilan gula sebagai bahan pokok
Surat mensekneg no.B. 126/ abn sekneg/3/74, 27 maret 1974	Pengusahaan, pengawasan, dan penyaluran gula pasir non PNP	Penjelasan mengenai kepres no. 43/1971 yang meliputi gula pnp
Inpres no.9/1975, 22 April 1975	Intensifikasi tebu (TRI)	Peningkatan produksi gula serta peningkatan pendapat petani tebu
Kepmen perdagangan dan koperasi no. 122/kp/III/81, 12 maret 1981	Tataniaga gula pasir dalam negeri	Menjamin kelancaran pengadaan dan penyaluran gula pasir serta peningkatan pendapatan petani
Kepmenkeu no. 342/KMK. 011/1987	Penetapan harga gula dalam negeri dan import	Menjamin stabilisasi harga, devisa, serta kesesuaian pendapatan petani, pendapatan petani dan pabrik
UU NO. 12/ 1992	Budidaya tanaman	Memberikan kebebasan pada petani untuk menanam komoditas sesuai dengan prospek pasar
Inpres no. 5/ 1997, 29 Desember 1998	Program pengembangan tebu rakyat	Pemberian peranan pada pelaku bisnis dalam rangka perdagangan bebas
Inpres no. 5/1997, 29 Desember 1998	Penghentian pelaksanaan INPRES no. 5/1997	Kebebasan kepada untuk memilih komoditas sesuai dengan UU No. 12/1992
Kepmenperindag no. 25/MPP/kep/1/1998	Komoditas yang diatur tata niaga	Mendorong efisiensi dan kelancaran arus barang
Kepmenhutbun no. 282/kpts-IX/1999	Penetapan harga provenue gula pasir	Menghindari kerugian petani
Keperindag no. 363/KMK/kep/6/1999	Tata niaga import gula	Pengurangan beban anggaran pemerintah melalui impor gula untuk melindungi industri dalam negeri
Kepmenperindag no. 230/MPP.kep/8/1999	Mencabut kepmenperindag no. 363/MPP/kep/6/1999	Pembebasan tarif impor gula untuk melindungi industri dalam negeri
Kepmenkeu no. 324/KMK.01/2002	Perubahan bea masuk	Peningkatan efektifitas bea masuk
Kepmenperindag no. 643/MPP/kep/9/2002	Tata niaga import gula	Pembatasan pelaku impor gula hanya pada impoortir gula terdaftar untuk peningkatan pendapatan petani/produsen

Kepmenperindag no. 527/MPP/kep/9/2004	Penyempurnaan tata niaga gula	IT wajib menyangga harga tingkat petani dan impor dilakukan bila harga minimum Rp 3410,00
---------------------------------------	-------------------------------	---

(Sudana, *dkk*, 2000).

Tebu lebih banyak diolah menjadi gula pasir. Hasil tebu dari TRI, semuanya digiling di PG menjadi gula pasir. Sedangkan tebu dari TRB, selain dijual ke PG masih ada alternatif lain. Sebelum adanya program TRI, sebagian besar tebu dari TRB dijual dalam bentuk batangan. Sebagian lagi ada yang mengolahnya menjadi gula merah. Sebagian kecil lainnya digiling di PG. Petani memilih menjual dalam bentuk batangan kepada pedagang pengumpul, karena ingin modalnya cepat kembali. Apabila dijual ke PG, penentuan harga dan pembayaran dilakukan setelah kandungan rendemen diketahui. Banyak petani yang kurang mengetahui bahwa keuntungan yang diperoleh dengan menjual kepada tengkulak lebih rendah bila dibanding langsung menjual ke PG. Setelah adanya program TRI, petani mulai menggiling tebunya ke PG.

Gambar 1. Skema Jalur Tataniaga Tebu



Keterangan:

P₃GI : Pusat Penelitian Pabrik Gula Indonesia

PG : Pabrik Gula

KUD : Koperasi Unit Desa

Petani TRI : Petani Tebu Rakyat Intensifikasi

Petani TRB : Petani Tebu Rakyat Bebas

(Tim Penulis, 1992:100).

Perjalanan gula pasir dari pabrik sampai ke konsumen, berbeda dengan jalur tata niaga hasil perkebunan lain. Tata niaga gula diatur oleh Badan Urusan Logistik (BULOG). Bulog ditunjuk oleh pemerintah dalam Kepres no. 43 tahun 1971 untuk mengatur distribusi gula dan bekerja sama dengan Departemen Pertanian dan Bank Bumi Daya (BBD).

Tiga lembaga itu mempunyai fungsi sendiri-sendiri, tetapi memiliki keterkaitan. Departemen Pertanian menangani atau membawahi pabrik gula. Bank Bumi Daya sebagai penyangga dana. Pada saat membeli gula dari PG-PNP, BULOG menggunakan dana dari BBD terlebih dahulu. Sedangkan BULOG mengatur distribusi dan bertanggung jawab terhadap persediaan gula atau *stock holder*.

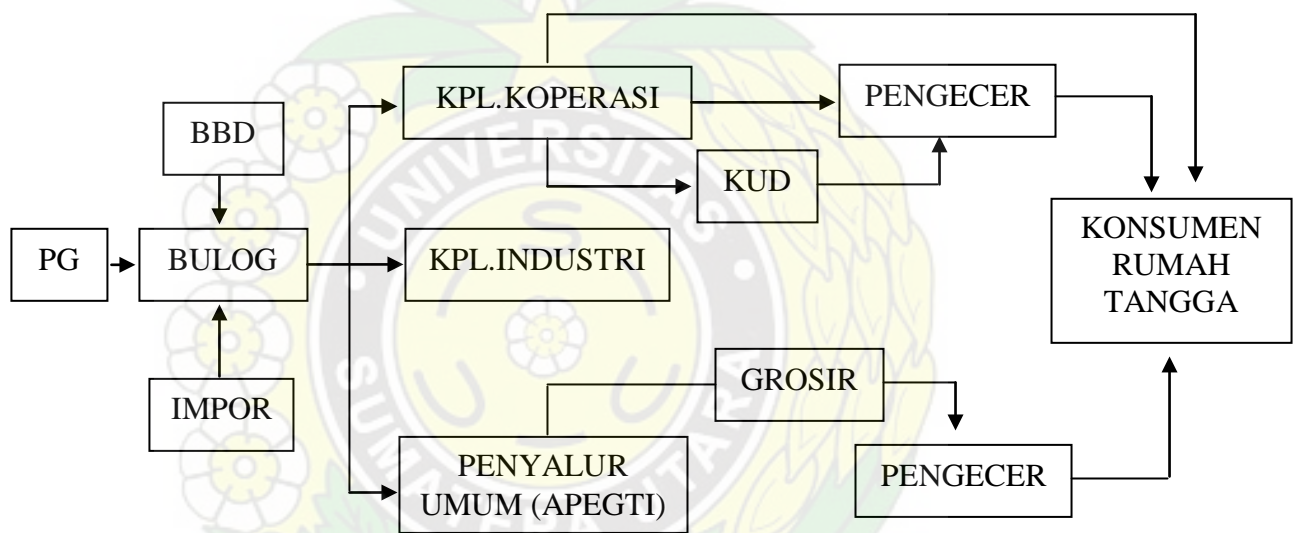
Sebagai pusat distribusi, BULOG membeli gula dari empat sumber, yaitu:

1. gula bagian petani
2. gula milik PG-PNP
3. gula milik PG non PNP, dan
4. gula impor

Dari BULOG gula disalurkan ke kelompok koperasi, kelompok industri, dan penyalur umum. Kelompok koperasi terdiri dari Pusat Koperasi Unit Desa (PUSKUD), Koperasi Serba Usaha, Koperasi Pedagang Pasar, Koperasi Pengusaha Roti Jakarta, dan sebagainya. Gula yang berasal dari kelompok

koperasi dapat diterima oleh konsumen, melalui pengecer ke konsumen, atau ke KUD Model (KUD yang ditunjuk untuk menyalurkan gula) dilanjutkan ke pengecer sebelum ke konsumen. Kelompok Industri merupakan konsumen yang langsung membeli barang dari BULOG. Sedangkan penyalur umum bergabung menjadi satu dalam wadah Asosiasi Penyalur Gula dan Tepung Terigu (APEGTI). Dari APEGTI gula disalurkan ke grosir. Dari grosir dapat langsung ke konsumen atau melalui pengecer.

Gambar 2. Skema Jalur Tataniaga Gula Pasir



Keterangan:

BBD : Bank Bumi Daya

BULOG : Badan Urusan Logistik

KPL.Koperasi : Kelompok koperasi terdiri dari pusat koperasi Unit Desa (PUSKUD), Koperasi Serba Usaha, Koperasi pedagang Pasar, Koperasi Pengusaha Roti Jakarta, dan sebagainya

KPL. Industri : Kelompok Industri

(Tim Penulis, 1992: 101-102)

2.2. Landasan Teori

Pasar merupakan tempat pertemuan antara penjual dan pembeli atau pasar adalah daerah atau tempat yang didalamnya terdapat kekuatan-kekuatan permintaan dan penawaran yang saling bertemu untuk membentuk suatu harga. Pasar dapat pula diartikan sebagai suatu kelompok yang diorganisasikan untuk melakukan tawar-menawar sehingga dengan demikian terbentuk harga (Musrid, 1993:25).

Pemasaran merupakan hal-hal yang sangat penting setelah selesainya produksi pertanian. Kondisi pemasaran menimbulkan suatu siklus atau lingkaran pasar suatu komoditas. Bila pemasarannya tidak lancar dan tidak memberikan harga yang layak bagi petani maka kondisi ini akan mempengaruhi motivasi petani. Akibatnya penawaran akan berkurang, kurangnya penawaran akan menaikkan harga. Setelah harga naik, motivasi petani akan bangkit lagi. Hasilnya penawaran meningkat, menyebabkan harga jatuh kembali (*ceteris paribus*) (Daniel, 2002: 154).

Sistem tataniaga adalah kumpulan lembaga-lembaga yang secara langsung dan tidak langsung terlibat dalam kegiatan pemasaran barang dan jasa, yang saling mempengaruhi dengan tujuan mengalokasikan sumber daya langkah secara efisien guna memenuhi kebutuhan manusia sebanyak-banyaknya. Komponen-komponen sistem tataniaga tersebut adalah para produsen, penyalur, dan lembaga-lembaga lainnya yang secara langsung ataupun tidak langsung terlibat dalam proses pertukaran barang dan jasa (Radiosunu, 1995:8).

Dalam pemasaran komoditi pertanian terdapat pelaku-pelaku ekonomi yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung, dengan cara melaksanakan

fungsi-fungsi pemasaran. Komoditi-komoditi yang dipasarkan juga bervariasi kualitas dengan harga yang beragam pula. Fungsi-fungsi pemasaran yang dilakukan lembaga-lembaga pemasaran juga bervariasi (Sudiyono,2004).

Dalam hal ini komoditi pertanian, khususnya komoditi pertanian yang menyangkut kepentingan orang banyak, maka kebijaksanaan harga sering diatur oleh pemerintah. Tetapi komoditi lain, yang tidak diatur oleh pemerintah, besar kecilnya harga barang diserahkan pada pasar. Kebijaksanaan harga yang diatur oleh pemerintah ditetapkan melalui dua macam harga, yaitu harga dasar (*floor price*) dan harga atap (*ceiling price*)(Soekartawi, 2002).

Saluran pemasaran/saluran distribusi terdiri dari seperangkat lembaga yang melakukan semua kegiatan (fungsi) yang dilakukan untuk menyalurkan produk atau status pemilikannya dari produsen ke konsumen (Saladin, 1996).

Dalam pemasaran komoditi pertanian, seringkali dijumpai adanya rantai pemasaran yang panjang, sehingga banyak juga pelaku lembaga pemasaran yang terlibat dalam rantai pemasaran tersebut. Akibatnya adalah terlalu besarnya keuntungan pemasaran (*marketing margin*) yang diambil oleh para pelaku pemasaran tersebut (Soekartawi,1993:121).

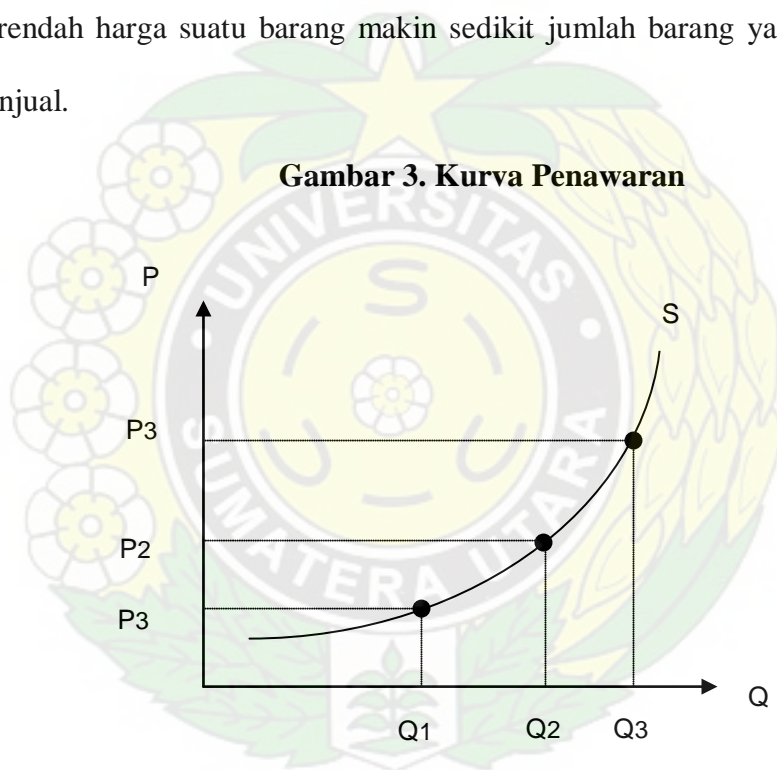
Penawaran hasil untuk dijual dipengaruhi oleh beberapa variable penting sebagai berikut:

- Tingkat harga komoditas itu sendiri
- Tingkat harga-harga inputnya
- Bagaimana tujuan perusahaan
- Tahap perkembangan teknologi

Dimana meningkat tingkat harga keseimbangan/ekuilibrium akan menyebabkan naiknya jumlah penawaran. Dengan kata lain, makin tinggi tingkat harga suatu komoditas, maka semakin besar jumlah komoditas yang ditawarkan (Sanusi, 2003: 48).

Hukum penawaran menjelaskan hubungan antara harga suatu barang dengan jumlah penawaran barang tersebut. Makin tinggi harga barang, makin banyak jumlah barang tersebut yang ditawarkan oleh para penjual, dan sebaliknya makin rendah harga suatu barang makin sedikit jumlah barang yang ditawarkan oleh penjual.

Gambar 3. Kurva Penawaran



(Joesron dan Fathorrozi, 2003: 19).

Biasanya suatu pemerintah sering melakukan kebijaksanaan yang berkaitan dengan upaya pengendalian tingkat harga. Kebijakan pengendalian harga yang dilakukan pemerintah yakni untuk menahan tingkat harga pasar dibawah titik equilibrium. Pemerintah sering menentukan suatu tingkat harga minimum baik barang maupun jasa atau suatu komoditas tertentu yang biasa

disebut *floor price* /harga minimum. Disamping itu pemerintah juga menetapkan tingkat harga maksimum atau biasa dikenal dengan istilah *ceiling price*. Sebagai harga jual suatu barang atau jasa (Sanusi, 2003:59-60).

Sistem pemasaran (tataniaga/*marketing*) baru dikatakan efisien apabila:

1. Mampu menyampaikan hasil-hasil dari petani produsen kepada konsumen dengan biaya yang serendah-rendahnya.
2. Mampu mengadakan pembagian yang adil dari seluruh harga yang dibayar konsumen terakhir kepada semua pihak yang ikut serta dalam kegiatan produksi pemasaran.

(Daniel, 2002: 155).

Ada 5 faktor yang menyebabkan mengapa tataniaga itu penting, yaitu:

- jumlah produk yang dijual turun
- pertumbuhan perusahaan juga turun
- terjadi perubahan yang diinginkan konsumen
- kompetisi yang semakin tajam
- terlalu besarnya pengeluaran untuk penjualan

saluran pemasaran/tataniaga yaitu kelompok semua perusahaan dan individu-individu yang bekerja sama untuk memproduksi, mendistribusikan dan mengkonsumsi barang atau jasa khusus yang diproduksi oleh produsen tertentu. Perantara pemasaran merupakan lembaga yang memberikan kemudahan pendistribusian komoditi ke pemasar terakhir. Peranan lembaga inilah yang pada umumnya menentukan bentuk saluran tataniaga (Wanardi,1989:187).

Lembaga tataniaga/pemasaran melakukan fungsi tataniaga yang meliputi kegiatan:

A. Fungsi Pertukaran

1. Pembelian (*Buying*) adalah memilih barang-barang yang dibeli untuk dijual dengan harga dan kualitas produk tertentu.
2. Penjualan (*Selling*) adalah sumber pendapatan yang diperlukan untuk menutupi ongkos-ongkos dengan harapan mendapatkan laba.

B. Fungsi Pengadaan/Penyediaan

1. Penyimpanan (*storage*) adalah fungsi penyimpanan barang-barang pada saat barang selesai diproduksi sampai pada saat barang dikonsumsi.
2. Pengangkutan (*transportasi*) adalah fungsi pemindahan barang dari tempat barang dihasilkan ketempat barang dikonsumsi.

C. Fungsi Pemberian Fasilitas

1. Standarisasi (*Standardization*) adalah penentuan batas-batas dasar dalam pembentukan spesifikasi barang-barang hasil manufaktur, disebut juga normalisasi.
2. Permodalan/pembiayaan (*Financing*) adalah fungsi mendapatkan modal dari sumber ekstern guna menyelenggarakan kegiatan pemasaran.
3. Penanggungan resiko (*Risk Taking*) adalah fungsi menghindari dan mengurangi resiko yang berkaitan dengan pemasaran.
4. Informasi (*market information*) adalah fungsi untuk mengumpulkan dan penafsiran keterangan-keterangan tentang macam barang yang beredar dipasaran, jumlah, macam barang yang dibutuhkan konsumen, harga dan sebagainya.

(Winardi, 1989:300).

Biaya tataniaga terjadi sebagai konsekuensi logis dari pelaksanaan fungsi-fungsi tataniaga. Biaya tataniaga ini menjadi bagian tambahan harga pada barang-barang yang harus ditanggung oleh konsumen. Komponen biaya tataniaga terdiri semua jenis pengeluaran yang dikorbankan oleh setiap *middleman* dan lembaga tataniaga yang berperan secara langsung dan tidak langsung dalam proses perpindahan barang, dan keuntungan (*profit margin*) yang diambil oleh *middleman* atas jasa modalnya (Gultom, 1996: 64).

Besarnya biaya tataniaga berbeda satu sama lain, tergantung pada:

a. macam komoditas yang dipasarkan,

Ada komoditas yang bobotnya besar, tetapi nilainya kecil sehingga membutuhkan biaya tataniaga yang yang besar.

b. Lokasi/daerah produsen,

Bila lokasi produsen jauh dari pasar atau lokasi konsumen maka biaya transportasi menjadi besar pula.

c. Macam dan peranan lembaga niaga,

Semakin banyak lembaga niaga maka semakin panjang rantai tataniaga dan semakin besar biaya tataniaganya.

(Daniel, 2002: 158).

Beberapa sebab mengapa terjadi rantai tataniaga hasil pertanian yang panjang dan produsen (petani) sering dirugikan antara lain:

a. pasar yang tidak bekerja secara sempurna

b. lemahnya informasi pasar

c. lemahnya posisi produsen untuk melakukan penawaran untuk mendapatkan barga yang baik.

- d. Produsen (petani) melakukan usahatani tidak didasarkan pada permintaan pasar

(Soekartawi, 1991: 121).

Beberapa masalah pemasaran/tataniaga komoditi pertanian yang banyak ditemukan di negara-negara berkembang pada umumnya dan di Indonesia pada khususnya antara lain sebagai berikut:

- a. Tidak tersedianya komoditi pertanian dalam jumlah yang kontiniu
- b. Harga komoditi yang sering berfluktuasi secara tajam yang bukan saja berpengaruh terhadap kestabilan pendapatan produsen dan tingkat konsumsi masyarakat, tetapi juga akan memperbesar resiko pemasaran
- c. Tidak efisiennya para pelaku pasar dalam melakukan kegiatan
- d. Tidak memadainya fasilitas misalnya sistem transportasi, gudang, tempat komoditi pertanian yang dipasarkan, dan lain-lain
- e. Lokasi produsen dan konsumen yang terpencar juga merupakan masalah kerana menyulitkan dalam penyampaian barang dari produsen ke konsumen
- f. Kurang lengkapnya informasi pasar
- g. Kurangnya pengetahuan terhadap pemasaran
- h. Kurangnya modal
- i. Tidak memadainya peraturan-peraturan yang ada

(Hadikoesworo, 1986: 87).

Penentuan harga gula telah ditentukan pemerintah. Ikut sertanya pemerintah ini mempunyai tujuan untuk:

1. melindungi produsen agar merangsang penintgkatan produksi

2. menjaga kemampuan konsumen, dan
3. mengembangkan tataniaga gula pasir pedagang dalam negeri maupun perdagangan internasional

(Tim Penulis, 1992: 99).

Harga adalah sinyal kelangkaan suatu barang. Harga barang yang tinggi mengindikasikan bahwa barang tersebut langka, sedangkan harga barang yang rendah mengindikasikan bahwa barang tersebut tersedia lebih. Harga yang dibentuk oleh pasar bersaing sempurna adalah harga yang mampu menghasilkan kesejahteraan tertinggi bagi para pelaku ekonomi (Sunaryo, 2001: 188).

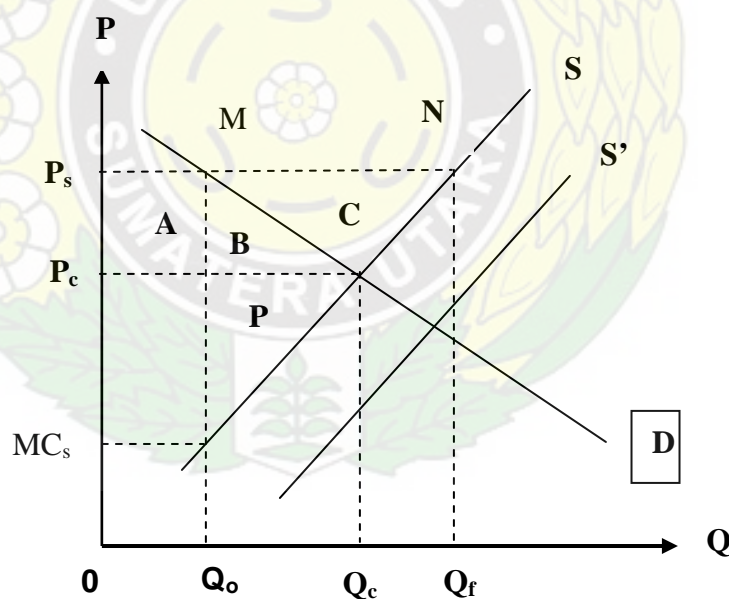
Pemerintah sering meregulasi pasar. Dampak dari regulasi selalu akan tercermin di harga. Salah satu tujuan pemerintah melakukan regulasi adalah mentransfer pendapatan dari kelompok ekonomi yang satu ke yang lain. Selain transfer pendapatan, pemerintah meregulasi pasar untuk meningkatkan efisiensi kinerja pasar. Regulator sering menggunakan *price floor* (harga minimum) yang relatif tinggi untuk melindungi kelompok produsen tertentu, misalnya pemerintah menaikkan harga gabah kering giling untuk meningkatkan kesejahteraan petani. Regulator sering menggunakan instrumen *price ceiling* (harga maksimum) yang relatif lebih rendah biasanya untuk melindungi kelompok konsumen tertentu. Regulasi menetapkan harga tersebut pada dasarnya adalah regulator mentransfer pendapatan dari pelaku ekonomi yang satu ke yang lainnya (Sunaryo, 2001: 188).

Harga minimum yang rendah, yaitu di bawah *market clearing price*-nya, tentu saja tidak mempunyai arti. Jika harga minimum lebih rendah dari *market clearing*-nya, maka harga yang berlaku di pasar adalah harga yang berlaku di pasar adalah harga tersebut, bukan harga minimumnya. Harga minimum tebu

bertujuan mentransfer pendapatan dari konsumen ke produsen tebu. Untuk itu, harga minimum harus lebih tinggi dari harga *market clearing*-nya (pasar) (Sunaryo, 2001: 190).

Untuk menetapkan harga minimum, pemerintah akan membeli kelebihan penawaran suatu produk, sehingga harga mejadi lebih tinggi. Misalkan *price floor* adalah P_f . Tanpa *price floor*, harga pasar adalah P_c . Dengan *price floor* P_f , produsen menyediakan output Q_f , namun permintaannya hanya Q_o . Akibatnya, kelebihan penawaran sebesar $(Q_f - Q_o)$ harus dibeli oleh pemerintah dengan harga P_f . Dan, pemerintah juga harus membayar ongkos simpan sejumlah produk yang dibelinya dan ongkos institusinya (Sunaryo, 2001: 191).

Gambar 4. Price Floor



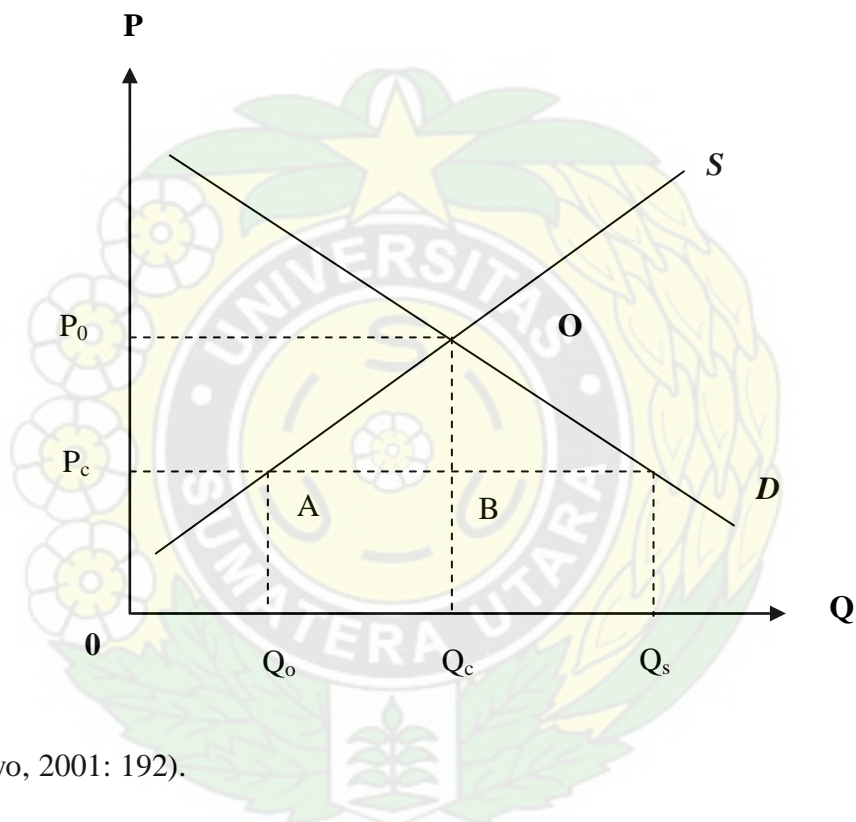
(Sunaryo, 2001:190).

Yang terjadi dalam *price floor* adalah transfer pendapatan dari konsumen ke produsen. Dal hal ini, *price floor* (P_f) mengurangi surplus konsumen sebesar luasan A dan B; produsen mendapatkan tambahan surfus produsen sebesar luasan

A, B dan C; pemerintah mengeluarkan ongkos sebesar Q_0MNQ_f untuk membeli kelebihan penawaran (Sunaryo, 2001:191).

Jika *price floor* bersifat pro-produsen, *price ceiling* (harga maksimum) yang rendah, yaitu lebih rendah dari pada *market clearing price*-nya, bersifat pro-konsumen.

Gambar 5. Price ceiling



(Sunaryo, 2001: 192).

Misalnya *ceiling price* adalah P_c . Pada *price ceiling* P_c , terjadi kelebihan permintaan sebesar AB . Untuk membuat harga bertahan pada tingkat P_c , maka pemerintah perlu mengeliminasi *exces demand* tersebut dengan penambahan penawaran sebesar AB . Harga yang terlalu murah akan memberi insentif bagi konsumen untuk mengkonsumsi produk tersebut tersebut “terlalu” banyak (*over consumption*). Dengan harga P_0 , total konsumsi sebesar Q_c ; dengan harga P_c , total konsumsi menjadi Q_s . Dengan harga jual yang rendah, tidak banyak podusen

yang mampu memproduksi, sehingga total produksi pada harga P_c adalah sebesar Q_0 . Jumlah yang lebih sedikit dari jumlah yang “diperintahkan” oleh harga pasar P_0 , yaitu Q_c . Jika kondisi awal *market clearing price*, maka dengan *ceiling price*, surplus konsumen akan bertambah sebesar P_0OBP_c . Tambahan surplus konsumen ini harus dibayar dengan pengurangan surplus produsen sebesar P_0OAP_c dan pengeluaran pemerintah sebesar Q_0Q_s dikalikan dengan P_0 , jika pemerintah membeli barang tersebut dari pasar internasional yang tentu saja kompetitif dengan P_0 (Sunaryo, 2001: 192).

Upaya-upaya perbaikan sistem tataniaga dilakukan oleh semua pihak yang terkait. Upaya-upaya itu antara lain:

1. Produsen harus dapat mengetahui dengan baik saluran tataniaga yang ditempuh, juga tentang informasi pasar pada saat produsen mempunyai hasil untuk dijual.
2. Lembaga tataniaga dapat melakukan integrasi sehingga biaya total tataniaga barang dapat dikurangi dan keuntungan lembaga tataniaga yang melakukan integrasi lebih besar
3. Konsumen dalam hal ini dilakukan usaha perbaikan dengan jalan pendidikan terhadap konsumen
4. Pemerintah, hal-hal yang dapat dilakukan yakni pengadaan pengawasan seperti mengeluarkan peraturan, perbaikan fasilitas tataniaga dan perbaikan alat-alat komunikasi.

(Gultom, 1996: 88-89).

2.3. Kerangka Pemikiran

Tataniaga merupakan suatu sistem yang tujuannya ialah mengaloaksikan barang dan jasa dari produsen ke konsumen. Aliran barang tersebut mencakup perpindahan barang dan jasa mulai dari subsistem pengadaan dan penyalurannya. Perpindahan itu terjadi karena adanya lembaga-lembaga tataniaga yang melakukan fungsi-fungsi tataniaga.

Aliran barang tersebut tidak selamanya melalui perantara, tetapi ada juga yang langsung dari produsen ke konsumen, ada yang melalui satu perantara dan seterusnya, tergantung pada saluran tataniaga yang terjadi dilapangan yang sebenarnya dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti jarak produsen ke konsumen.

Mekanisme tataniaga/pemasaran ini melibatkan beberapa pihak yang meliputi produsen, agen, pedagang pengecer, dan konsumen. Dalam hal ini produsen adalah pabrik gula pasir sedangkan konsumen merupakan rumah tangga.

Terdapat dua golongan besar lembaga-lembaga pemasaran yang mengambil bagian dalam saluran tataniaga. Mereka disebut pedagang dan perantara agen. Pedagang dapat digolongkan menjadi 3 macam yaitu:

1. Produsen, yaitu membuat sekaligus menyalurkan barang ke pasar
2. Pedagang besar, yang menjual barang ke pengusaha lain
3. Pengecer, yaitu yang menjual kepada konsumen akhir

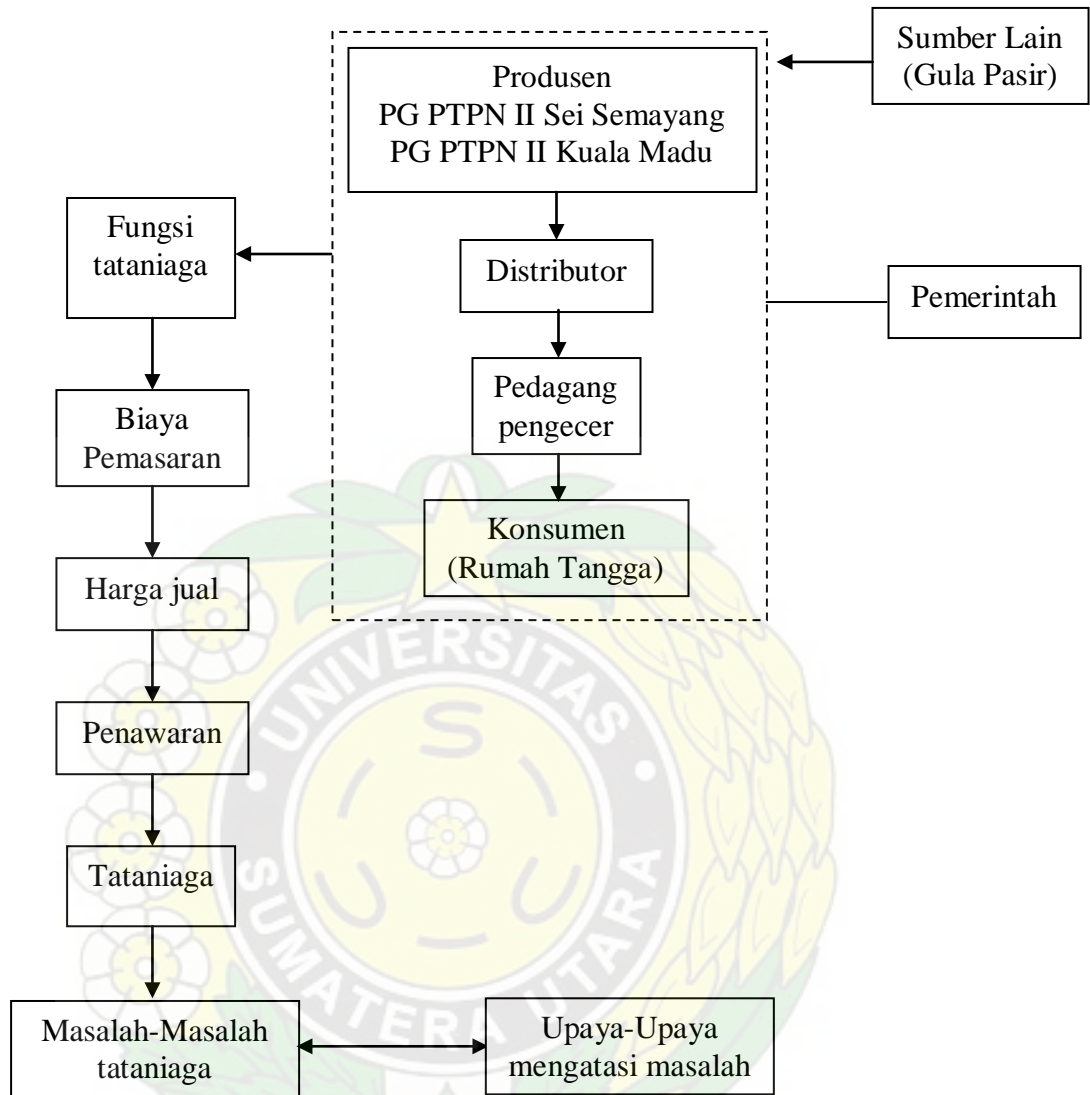
Tiap-tiap lembaga fungsi-fungsi tataniga meliputi: pembelian, penjualan, transportasi, penyimpanan, pembiayaan, penanggungan resiko, standarisasi, dan informasi pasar. Dalam melakukan fungsi-fungsi tataniaga maka akan dikeluarkan biaya pemasaran.

Biaya pemasaran adalah biaya-biaya yang dikeluarkan dalam melaksanakan fungsi-fungsi tataniaga. Biaya tersebut berbeda-beda pada masing-masing lembaga tataniaga. Atas jasa tersebut lembaga-lembaga mengambil keuntungan (*profit*). Dari biaya pemasaran ini ditetapkan harga gula pasir yaitu dengan menambahkan biaya pemasaran beserta keuntungan yang diperoleh lembaga tataniga.

Besar kecilnya biaya pemasaran tergantung jauh dekatnya jarak yang harus ditempuh hingga sampai kepada konsumen, banyaknya *middleman* dan banyaknya perlakuan yang dilakukan. Sehingga biaya pemasaran dapat dijadikan sebagai indikator efisiensi sistem tataniaga tersebut. Efisiensi tataniga merupakan persentase perbandingan antara biaya pemasaran terhadap nilai produk yang dipasarkan (harga jual produk), sehingga semakin besar biaya pemasaran maka semakin tidak efisien sistem tataniaga itu dan begitu jug sebaliknya.

Bila dalam sistem gula pasir tidak efisien dapat disebabkan karena adanya masalah-masalah dalam sistem tataniaga tersebut, sehingga perlu dilakukan upaya-upaya untuk meningkatkan sistem tataniaga gula pasir.

Gambar 6. Skema Kerangka Pemikiran



2.4. Hipotesis Penelitian

Berdasarkan landasan teori yang dibuat maka diajukan beberapa hipotesis berikut:

1. Saluran tataniaga gula pasir terdiri dari produsen, agen, pedagang eceran dan konsumen.
2. Jumlah produksi dan konsumsi gula pasir per tahun meningkat di propinsi Sumatera Utara.
3. Bila harga eceran di propinsi Sumatera Utara tinggi maka supply/penawaran gula pasir meningkat.
4. Peran pemerintah dan lembaga swasta dalam tataniaga gula pasir di propinsi Sumatera Utara adalah memberikan kemudahan dalam pengadaan gula pasir sampai ke konsumen akhir.
5. Upaya-upaya yang dilakukan pemerintah untuk memecahkan masalah yang dihadapi dalam tataniaga gula pasir di Sumatera Utara membuat kebijakan harga dan kebijakan tataniaga gula pasir.

III. METODE PENELITIAN

3.1. Metode Penentuan Daerah Penelitian

Penentuan daerah penelitian dilakukan secara *purposive sampling*, yaitu daerah penelitian dipilih berdasarkan tujuan tertentu yang dipandang sesuai dengan tujuan penelitian. Menurut Lubis (2002:17) *purposive sampling* dalam pemilihan sample dilakukan atas dasar pertimbangan peneliti di bidang yang sedang diteliti dan bertitik tolak pada penilai pribadi peneliti yang menyatakan bahwa sampel yang dipilih benar-benar representatif. Daerah penelitian ditetapkan di Sumatera Utara yang ditentukan secara sengaja dengan pertimbangan adalah daerah tersebut merupakan salah satu daerah yang memproduksi gula pasir yang berasal dari pabrik gula (PG) yang berlokasi di Kabupaten Deli Serdang dan Kabupaten Langkat.

3.2. Metode Penentuan Sampel

Penelitian dimulai dengan cara menelusuri saluran tataniaga mulai dari pangkal rantai tataniaga yaitu pabrik Gula (PG) yang terdapat di Sei Semayang, Kabupaten Deli Serdang dan Kuala Madu, Kabupaten Langkat dan Akhirnya kepada konsumen akhir.

a. Produsen

Untuk produsen diambil sampel yaitu pabrik gula (PG) yang terdapat di Sumatera Utara yaitu PG Sei Semayang dan PG Kuala madu. Metode pengambilan sampel dilakukan secara sensus dimana kedua pabrik gula diambil sebagai sampel.

b. Lembaga Tataniaga

Di daerah penelitian terdapat dua kategori lembaga tataniaga yang terlibat dalam tataniaga gula pasir, yakni: agen dan pedagang pengecer. Metode pengambilan sampel secara *snowball sampling*. Menurut Sugiarto, *dkk* (2001: 44) teknik *snowball sampling* sangat tepat digunakan bila populasi sangat spesifik. Cara pengambilan sampel dengan cara mengikuti alir gula pasir mulai dari pabrik gula hingga ke masing-masing lembaga tataniaga.

3.3. Metode pengumpulan Data

Data yang diperoleh dalam penelitian ini data primer dan sekunder. Data primer diperoleh secara langsung dengan responden yaitu PG Sei Semayang dan PG Kuala madu, pedagang agen dan pedagang pengecer dan konsumen. Data sekunder diperoleh melalui lembaga, instansi, atau dinas terkait dengan penelitian.

Tabel 2. Spesifikasi pegumpulan Data

Jenis Data	Sumber	Metode	Alat Pengambilan Data
Identitas produsen	Pabrik Gula(PG)	Wawancara	kuisener
Identitasn agen	Agen gula pasir	Wawancara	kuisener
Identitas penjual	Penjual gula pasir	Wawancara	Kuisener
Bentuk saluran tataniaga	Masing-masing lembaga tataniaga	Wawacara	Kuisener
Fungsi-fungsi tataniaga	Masing-masing lembaga tataniaga	Wawancara dan observasi	kuisener

3.4. Metode Analisis Data

Data yang diperoleh dari lapangan terlebih dahulu ditabulasi dan selanjutnya dianalisis dengan alat uji yang sesuai. Adapun analisis datanya sebagai berikut:

Hipotesis 1 akan diuji dengan menggunakan metode analisis deskriptif yaitu dengan mengamati saluran yang dilalui dari produsen ke konsumen akhir dalam tataniga gula pasir.

Hipotesis 2 akan dianalisis dengan metode analisis deskriptif menggunakan tabulasi sederhana yaitu dengan mengamati jumlah produksi dan jumlah konsumsi gula pasir dipropinsi Sumatera Utara selama tahun 2003-2005.

Hipotesis 3 akan diuji dengan metode analisis deskriptif tabulasi sederhana yaitu mengamati hubungan supply/penawaran gula pasir dipropinsi Sumatera Utara dengan harga eceran gula pasir.

Hipotesis 4 akan dianalisis dengan metode analisis deskriptif tabulasi sederhana yaitu dengan membuat tabulasi sederhana peran serta pemerintah dan lembaga swasta dalam penyaluran gula pasir di Sumatera Utara.

Hipotesis 5 akan dianalisis dengan metode analisis deskriptif tabulasi sederhana yaitu dengan mengamati upaya-upaya yang dilakukan pemerintah dalam mengatasi masalah-masalah tataniaga gula pasir.

3.5. Defenisi Batasan Operasional

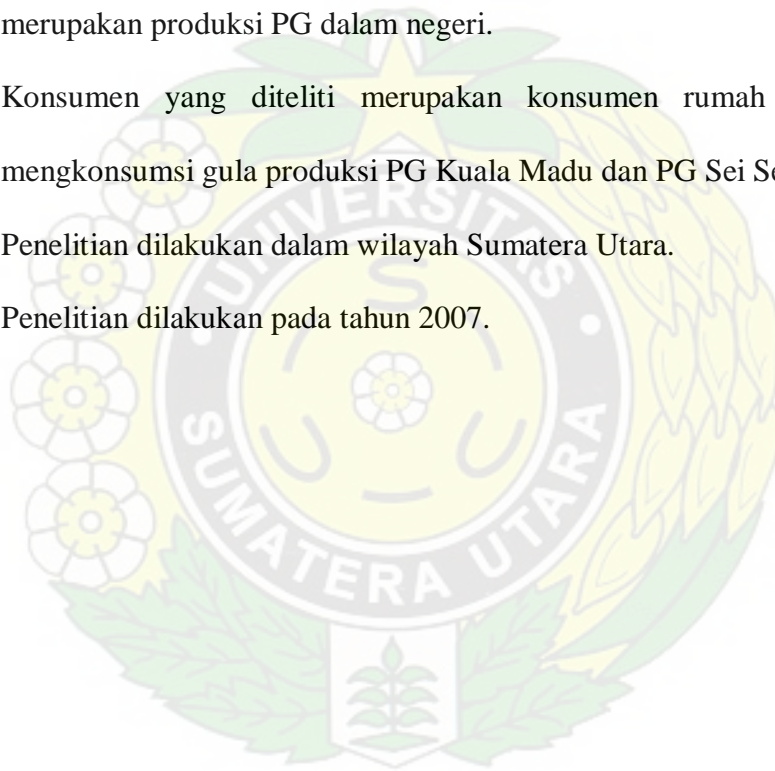
Untuk menghindari kesalahpahaman dan kekeliruan dalam penelitian ini, maka dibuat defenisi dan batasan operasional sebagai berikut:

3.5.1 Defenisi

1. Gula pasir adalah kristal putih manis hasil rendemen tebu yang dapat dikonsumsi langsung tanpa diproses lebih lanjut.
2. Produsen adalah perusahaan atau pabrik penghasil gula pasir dalam negeri.
3. distributor adalah perorangan atau badan usaha, baik yang dibentuk badan hukum ataupun bukan badan hukum yang ditunjuk oleh produsen untuk melakukan pembelian, penyimpanan, penyaluran, dan penjualan gula pasir.
4. Pengecer adalah orang atau badan usaha yang secara langsung melakukan penjualan gula pasir kepada konsumen.
5. Tataniaga adalah kegiatan ekonomi yang berfungsi membawa atau menyampaikan barang dari produsen ke konsumen.
6. Lembaga tataniaga adalah orang atau badan usaha yang terlibat dalam proses tataniaga gula pasir.
7. Saluran tataniaga adalah seluruh *channel* bagian tataniaga yang terdiri dari lembaga-lembaga yang berperan dalam penyampaian barang atau jasa.
8. Biaya tataniaga adalah biaya yang dikeluarkan oleh lembaga tataniaga dalam menyalurkan gula pasir dari produsen ke konsumen.
9. Petani TRI adalah petani tebu rakyat intensifikasi.
10. Petani TRB adalah petani tebu rakyat bebas.

3.5.2. Batasan Operasional

1. Gula pasir yang diteliti adalah gula pasir yang merupakan produksi dalam negeri yang berasal dari PG Sei Semayang dan PG Kuala Madu PTP Nusantara II (Persero).
2. Produsen gula pasir adalah pabrik dalam negeri yakni PG Sei Semayang dan PG Kuala Madu PTP Nusantara II (Persero).
3. Distributor adalah agen yang menyalurkan gula pasir dalam negeri yang merupakan produksi PG dalam negeri.
4. Konsumen yang diteliti merupakan konsumen rumah tangga yang mengkonsumsi gula produksi PG Kuala Madu dan PG Sei Semayang.
5. Penelitian dilakukan dalam wilayah Sumatera Utara.
6. Penelitian dilakukan pada tahun 2007.



IV. DESKRIPSI DAERAH PENELITIAN DAN KARAKTERISTIK SAMPLE

4.1. Deskripsi Daerah Penelitian

4.1.1. Luas Dan Letak Geografis Sumatera Utara

Propinsi Sumatera Utara berada di bagian barat Indonesia dengan ibukota propinsi Medan. Propinsi Sumatera Utara tergolong kedalam daerah beriklim tropis. Ketinggian permukaan daratan Sumatera Utara sangat bervariasi, sebagian daerahnya datar hanya beberapa meter di atas permukaan laut, beriklim cukup panas bisa mencapai 35,8 °C, sebagian daerah berbukit dengan kemiringan yang landai, beriklim sedang dan sebagian lagi berada pada daerah ketinggian yang suhu minimalnya bisa mencapai 13,0 °C. Berdasarkan letak dan kondisi alam, Sumatera Utara dibagi menjadi 3 kelompok wilayah yaitu Pantai Barat, Pantai Timur dan Dataran Tinggi. Luas daratan propinsi Sumatera Utara adalah 71.680,68 km². Propinsi Sumatera Utara terbagi atas 18 Kabupaten dan 7 Kota berdasarkan luas menurut Kabupaten/Kota di Sumatera Utara, daerah yang terbesar adalah Kabupaten Tapanuli Selatan 12.138,30 km² (16,93 %). Sedangkan daerah yang terkecil adalah Sibolga 10,77 km² (0,02 % dari total luas wilayah Sumatera Utara). Adapun batasan wilayah Sumatera Utara adalah sebagai berikut:

- sebelah utara berbatasan dengan Propinsi Nanggroe Aceh darussalam.
- sebelah timur berbatasan dengan Negara Malaysia di Selat Malaka.
- sebelah selatan berbatasan dengan Propinsi Riau dan Sumatera Barat.
- sebelah barat berbatasan dengan Samudera Hindia.

4.1.2. Penduduk Sumatera Utara

Menurut hasil pencacahan lengkap sensus penduduk (SP) 1990 penduduk Sumatera Utara berjumlah 10,26 juta jiwa dan dari hasil SP 2000 jumlah penduduk Sumatera Utara 11,51 juta jiwa. Selanjutnya dari hasil estimasi jumlah penduduk keadaan juni 2005 diperkirakan sebesar 12.326.786 jiwa. Sebaran penduduk Sumatera Utara berdasarkan Kabupaten dan kota adalah sebagai berikut.

Table 3. Jumlah Penduduk Dan Rumah Tangga Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2005

Kabupaten/kota		Penduduk ^{*)}	Rumah Tangga	Rata-Rata Banyaknya Anggota Rumah Tangga
1.	Nias	441.807	81.918	5,39
2.	Mandailing Natal	386.150	86.346	4,47
3.	Tapanuli Selatan	626.702	138.030	4,54
4.	Tapanuli Tengah	238.035	59.558	3,99
5.	Tapanuli Utara	256.201	56.437	4,60
6.	Toba Samosir	158.677	39.792	4,57
7.	Labuhan Batu	951.773	207.119	4,21
8.	Asahan	1.024.369	224.246	4,45
9.	Simalungun	826.101	196.071	3,79
10.	Dairi	261.287	58.718	4,50
11.	Karo	316.207	83.344	4,36
12.	Deli Serdang	1.569.638	348.728	5,41
13.	Langkat	970.433	222.346	4,54
14.	Nias Selatan	288.233	53.249	4,45
15.	Humbang Hasundutan	152.997	33.702	4,61
16.	Pakpak Barat	34.542	7.763	4,41
17.	Samosir	131.073	28.463	4,74
18.	Serdang Bedagai	588.176	133.431	4,87
19.	Sibolga	88.717	18.731	4,74
20.	Tanjung Balai	152.814	31.390	4,87
21.	Pematang Siantar	230.487	51.599	4,47
22.	Tebing Tinggi	135.671	30.629	4,43
23.	Medan	2.036.185	422.922	4,81
24.	Binjai	237.904	52.000	4,58
25.	Padang Sidempuan	177.499	50.488	3,52
Total		12.326.678	2.705.189	4,56

Sumber: Badan Pusat Statistik
Sumatera Utara

4.2. Karakteristik Sampel

4.2.1. Karakteristik Pabrik Gula Sei Semayang

Pabrik gula Sei Semayang sebagai produsen gula pasir dalam negeri mulai beroperasi 21 april 1982. Kapasitas giling tebu Pabrik Gula Sei Semayang adalah 4000 TCD (ton cane of days). Pada awal berdirinya PG Sei Semayang dikelola oleh PTP IX tetapi sejak April 1994 PG Sei Semayang dikelola oleh PTP Nusantara II (Persero). Pabrik Gula Sei Semayang terletak di Desa Mulyorejo, Kabupaten Deli Serdang, Propinsi Sumatera Utara, dan berada lebih kurang 15 Km dari kota Medan.

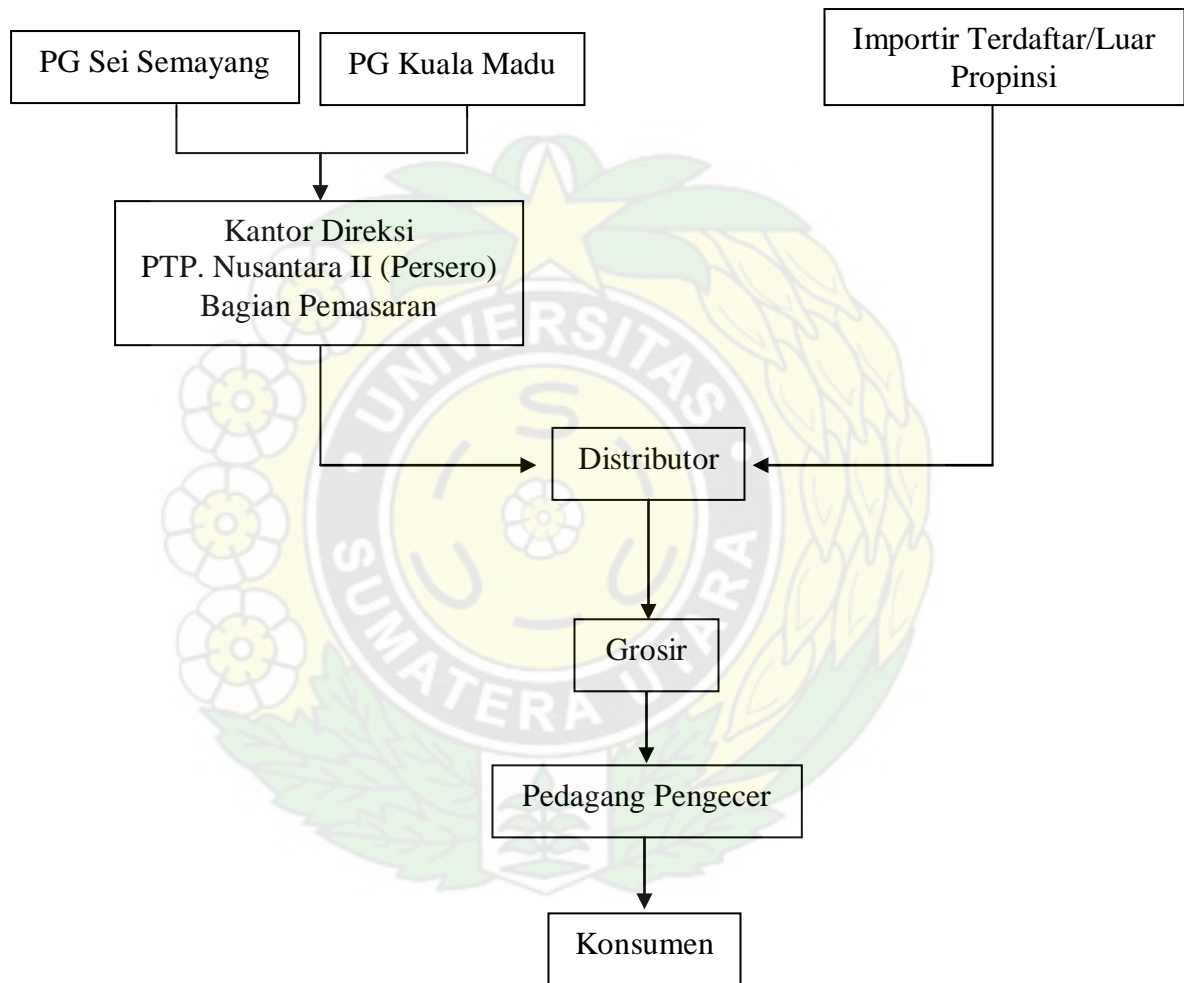
4.2.2. Karakteristik Pabrik Gula Kuala Madu

Pabrik Gula Kuala Madu pada awal berdirinya bersamaan dengan pabrik Gula Sei semayang. Pabrik Gula Kuala Madu pada awalnya berdirinya juga dikelola oleh PTP IX tetapi sejak April 1994 tanggung jawab pengelolaan diserahkan kepada PTP Nusantara II (Persero). Pabrik Gula Kuala Madu terletak di Desa Kwala Begumit Kabupaten Langkat, Propinsi Sumatera Utara, dan berada lebih kurang 25 Km dari ibukota Propinsi Sumatera Utara.

V. HASIL

5.1. Saluran Tataniaga Gula Pasir di Daerah Penelitian

Saluran tataniaga gula pasir di daerah penelitian dapat ditunjukkan pada gambar skema saluran tataniaga gula pasir berikut:

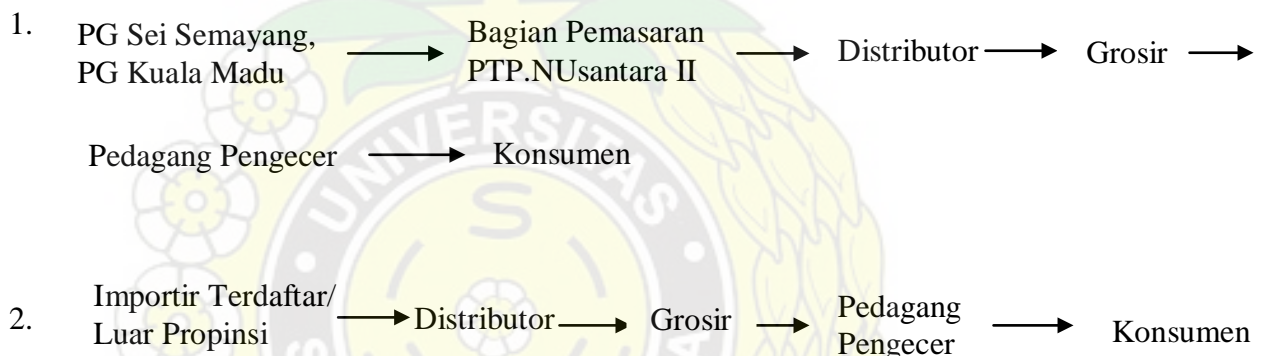


Gambar 7. Skema Tataniaga Gula Pasir di Daerah Penelitian

Gula pasir produksi PG Sei Semayang dan PG Kuala Madu, pemasarannya dilakukan oleh Kantor Direksi/Bagian Pemasaran PTP. Nusantara II(Persero) yang berdomisili di Tanjung Morawa. Sistem penjualan gula pasir produksi

PTP Nusantara II (Persero) dilakukan dengan sistem tender. Dalam pelaksanaan tender tersebut diikuti sertakan lembaga tataniaga. Peserta tender merupakan lembaga tataniaga atau badan usaha yang telah memiliki badan hukum yang telah diundang oleh PTP Nusantara II (Persero). Peserta tender yang memenuhi syarat dan memenangkan tender disebut distributor. Kemudian distributor menjual gula pasir tersebut ke grosir maupun pedagang pengecer di kabupaten/kota.

Maka berdasarkan gambar diatas, saluran tataniaga gula pasir di Sumatera Utara yaitu:



5.2. Jumlah Produksi dan Konsumsi Gula Pasir di Propinsi Sumatera Utara Tahun 2002-2005

5.2.1. Jumlah Produksi Gula Pasir di Sumatera Utara Tahun 2002-2005

Gula merupakan produk akhir dari pengolahan tebu yang terdapat dalam bahan kering yang tidak larut dalam nira. Produksi gula pasir Sumatera Utara merupakan produksi dari PG Sei Semayang dan PG Kuala Madu. Adapun produksi gula pasir PG Sei Semayang dan PG Kuala Madu lima tahun terakhir adalah sebagai berikut:

Tabel 4. Produksi Gula Pasir Sei Semayang Tahun 2002-2005

Tahun	Produksi (Ton)			
	PG Sei Semayang	Pertumbuhan (%)	PG Kuala Madu	Pertumbuhan (%)
2002	13.009,4	-	16.901,5	-
2003	12.014,5	- 8,00	14.806	- 14,15
2004	0	-	11.985	- 23,53
2005	17.627,4	100	23.009	47,91
Rerata	10662.83	23	16.675,4	2,55

Sumber : Lampiran 1a-1h

Produksi gula pasir pada Pabrik Gula Sei Semayang dan Pabrik Gula Kuala Madu setiap tahunnya pada tahun 2002, 2003, 2004 mengalami penurunan pada kedua pabrik. Tetapi secara rata-rata produksi gula pasir pada kedua pabrik mengalami pertumbuhan dengan rerata pertumbuhan untuk PG Sei Semayang sebesar 23 persen dan PG Kuala Madu mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 2,55 persen. Pada PG Sei Semayang mengalami penurunan yang cukup besar pada tahun 2004 dimana pabrik tidak melakukan proses penggilingan yang diakibatkan produksi tanaman tebu tidak memenuhi kriteria penggilingan baik dari segi rendemen nira maupun segi jumlah produksi tebu per hari yang mencukupi kapasitas giling pabrik sebesar 4000 ton tebu per hari. Sehingga proses penggilingan untuk Kebun Sei Semayang di pindahkan ke Pabrik Gula Kuala Madu.

Jumlah produksi Pabrik Gula Sei Semayang dan Pabrik Gula Kuala Madu berpengaruh terhadap jumlah produksi gula pasir Sumatera Utara. Jumlah produksi gula pasir di Sumatera Utara dapat diuraikan pada Tabel 6 berikut:

Tabel 6. Produksi Gula Pasir Sumatera Utara Tahun 2002-2005

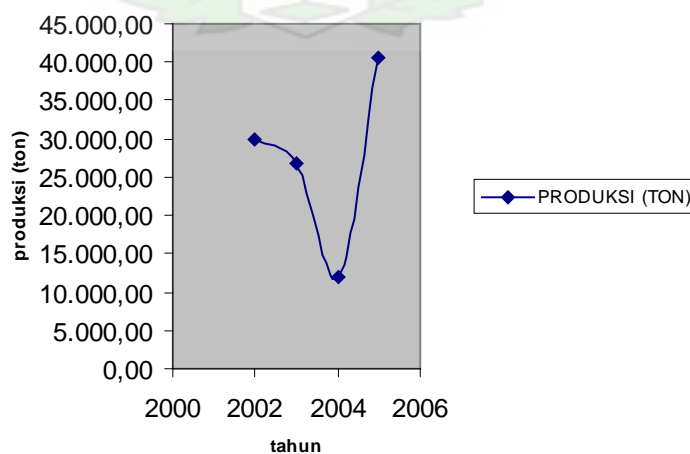
TAHUN	PRODUKSI (TON)	PERTUMBUHAN
2002	29.910,9	-
2003	26.820,5	- 10,23
2004	11.985	- 55,36
2005	40.636,4	239
RERATA	27.345,96	57,80

Sumber : Lampiran 1a-1h

Produksi gula pasir di Sumatera Utara selama tahun 2002-2005, secara rata-rata mengalami peningkatan. Hal tersebut ditunjukkan pada Tabel 6 dimana rata-rata pertumbuhan produksi gula meningkat sebesar 57,80 persen. Secara keseluruhan produksi gula pasir mengalami peningkatan, tetapi pada tahun 2002-2004 setiap tahunnya mengalami penurunan dimana rata-rata produksi turun sebesar 32,79 persen setiap tahunnya. Penurunan produksi terbesar terjadi pada tahun 2004, dimana produksi turun 55,36 persen dari tahun sebelumnya atau turun 14.866,5 ton. Pada tahun 2005, produksi gula pasir meningkat 239 persen dari tahun sebelumnya atau naik 28.651,4 ton.

Perkembangan produksi gula pasir di Sumatera Utara tahun 2002-2006 digambarkan pada kurva berikut :

Gambar 8. Produksi Gula Pasir Sumatera Utara Tahun 2002-2005



Pada grafik diatas terlihat bahwa pada tahun 2004 produksi gula pasir Sumatera Utara terjadi penurunan yang sangat drastis disebabkan karena Pabrik Gula Sei semayang tidak berproduksi. Tidak berproduksinya pabrik dikarenakan produksi tebu kebun Sei semayang tidak mencukupi kapasitas giling PG Sei Semayang.

5.2.2. Jumlah Konsumsi Gula Pasir di Sumatera Utara Tahun 2002-2005

Jumlah konsumsi gula pasir di propinsi Sumatera Utara tahun 2002-2005 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 7. Konsumsi Gula Pasir Propinsi Sumatera Utara Tahun 2002-2005

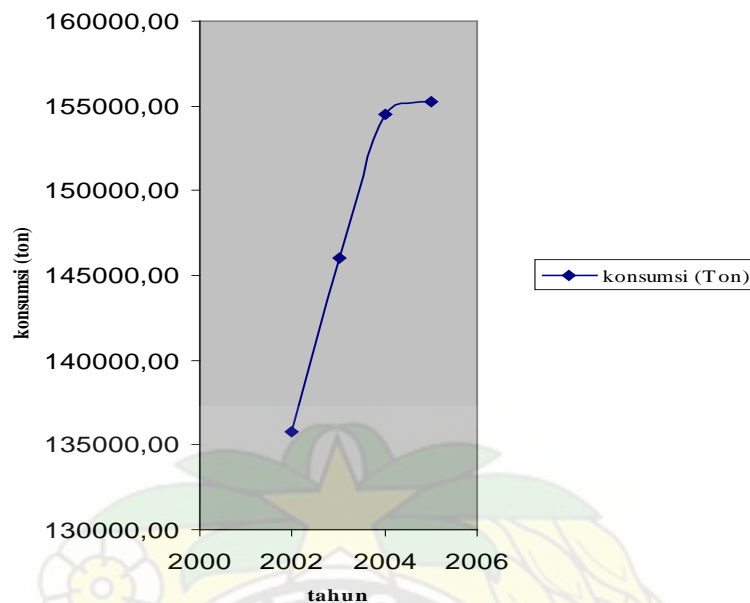
TAHUN	Jumlah Penduduk (Jiwa)	KONSUMSI (Ton)	PERTUMBUHAN (%)
2002	11.863.692	135.760,48	-
2003	12.006.538	145.987,04	7,53
2004	12.138.959	154.495,19	5,83
2005	12.326.678	155.223,68	0,65
RERATA	12.083.967	147866,59	4,67

Sumber : Lampiran 2a-2d

Dari Tabel 7, dapat dilihat bahwa konsumsi gula pasir di Propinsi Sumatera Utara setiap tahunnya bertambah seiring pertumbuhan penduduk. Pada tahun 2002, konsumsi gula pasir sebesar 135.760,48 Ton. Pada tahun 2003, konsumsi gula pasir naik 7,53 persen menjadi 145.987,04 Ton. Pada tahun 2004, kebutuhan gula pasir meningkat menjadi 154.495,19 Ton atau naik 5,83 persen dari tahun sebelumnya. Pada tahun 2005, konsumsi gula pasir meningkat cukup tinggi sebesar 0,65 persen yakni 155.223,68 Ton.

Rata-rata konsumsi gula pasir di Propinsi Sumatera Utara selama tahun 2002-2005 adalah 147866,59 Ton dengan jumlah penduduk rata-rata sebesar 12.083.967 jiwa dengan rata-rata pertumbuhan konsumsi 4,67 persen pertahun. Pertumbuhan konsumsi gula pasir dapat dilihat pada Gambar 9.

Gambar 9. Konsumsi Gula Pasir di Sumatera Utara Tahun 2002-2005



Dari gambar diatas dapat dilihat bahwa konsumsi gula pasir meningkat dari tahun ke tahun selama 2002-2005.

5.3. Hubungan Antara *Supply*/Penawaran Gula Pasir Dengan Harga Eceran Di Sumatera Utara

Supply/penawaran gula pasir di Sumatera Utara merupakan jumlah gula pasir yang dapat disalurkan ke pasar di setiap daerah. Jumlah gula yang disalurkan merupakan jumlah total dari gula produksi PTP. Nusantara II (Persero), stok awal, dari propinsi lain dan impor. Adapun jmlah gula pasir yang dapat ditawarkan terlihat pada Tabel 8.

Tabel 8. Ketersediaan Gula Pasir di Sumatera Utara Tahun 2002-2005

TAHUN	STOCK AWAL	PRODUKSI	MASUK/ IMPOR	TOTAL	KONSUMSI	CADANGAN/ STOCK
2002	6890	29910,90	106769	143569,90	135.760,48	7809,42
2003	7809,42	26851,50	119300	153960,92	145.987,04	7973,88
2004	7973,88	11985,02	138900	158858,90	154495,19	4363,71
2005	4363,71	40636,40	114500	159500,11	155223,68	4276,43

Sumber : Lampiran 3

Dari data diatas dapat dilihat bahwa jumlah gula pasir yang ditawarkan setiap tahunnya meningkat. Jumlah gula pasir yang ditawarkan dipengaruhi oleh harga. Perkembangan rata-rata harga gula pasir di Sumatera Utara tahun 2002-2005 dapat dilihat pada Tabel 9.

Tabel 9. Perkembangan Rata-Rata Harga Gula Pasir Tahun 2002-2005

TAHUN	RERATA HARGA	PERTUMBUHAN HARGA (%)
2002	3474,49	-
2003	4263,92	22,72
2004	4240,52	- 0,55
2005	6272,64	47,92

Sumber : Lampiran 4a-4d

Harga gula pasir setiap tahunnya meningkat, hal tersebut dapat dilihat dari tabel diatas. Pada tahun 2002, harga rata-rata gula pasir sebesar 3474,49 rupiah. Pada tahun 2003, harga rata-rata gula pasir meningkat 22,72 persen atau meningkat menjadi 4263,92 rupiah. Pada tahun 2004, harga rata-rata gula pasir mengalami penurunan cukup kecil sebesar 0,55 persen. Sedangkan pada tahun 2005, harga rata-rata gula meningkat cukup tinggi menjadi 6272,64 rupiah atau meningkat 47,92 persen dari tahun sebelumnya.

5.4. Peran Pemerintah Dan Lembaga Swasta Dalam Penyaluran Gula Pasir Di Propinsi Sumatera Utara

Gula pasir merupakan suatu komoditi yang memiliki kedudukan yang unik karena disadari bahwa gula pasir menyangkut kepentingan banyak pihak, sehingga kebijakan-kebijakan yang terkait dengan gula pasir harus menggambarkan kepentingan pihak-pihak seperti petani tebu, pabrik gula, konsumen gula dan kepentingan pemerintah. Kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah terkait dengan segi produksi, pengolahan, dan pemasarannya. Beberapa kebijakan yang dikeluarkan terkait dalam memperlancar penyaluran

gula pasir antara lain Kepres no. 43/ 1971 tentang Pengadaan, Penyaluran dan Pemasaran gula yang bertujuan menjaga kestabilan gula sebagai bahan pokok. Pada tahun 1981 pemerintah mengeluarkan Kepmen perdagangan dan koperasi no. 122/kp/III/1981 mengenai Tataniaga Gula Pasir Dalam Negeri, peranan dikeluarkannya keputusan menteri tersebut bertujuan untuk menjamin kelancaran pengadaan dan penyaluran gula pasir serta peningkatan pendapatan petani.

Dalam penyaluran gula pasir selain peran pemerintah sebagai pihak pembuat kebijakan terdapat juga pihak-pihak pelaku tataniaga yang berperan dalam penyaluran gula pasir. Dalam hal ini lembaga swasta sebagai pelaku tataniaga memberikan kemudahan dalam pendistribusian gula pasir ke pemasar terakhir.

5.5. Upaya-Upaya Yang Dilakukan Pemerintah Untuk Memecahkan Masalah Tataniaga Gula Pasir

Dalam tataniaga gula pasir agar komoditi dapat dikonsumsi oleh konsumen rumah tangga terdapat berbagai permasalahan yang dihadapi baik dari sisi produksi, distribusi, diperlukan kebijakan pemerintah dalam mengatasinya.

Adapun masalah-masalah yang dihadapi antara lain:

- a. Produksi gula pasir yang berasal dari dalam negeri tidak dapat mencukupi konsumsi masyarakat akan gula pasir.
- b. Adanya pihak-pihak yang melakukan spekulasi pasar yang berusaha mempengaruhi pasokan gula pasir sehingga harga meningkat. Pasokan yang terbatas dengan harga tinggi menyebabkan terhambatnya akses masyarakat untuk memenuhi gula pasir yang dibutuhkan. Disamping itu

tidak lancarnya distribusi akibat keterbatasan sarana transportasi, terutama untuk menjangkau daerah-daerah yang terpencil.

Upaya-paya yang dapat dilakukan pemerintah untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi dalam tataniaga gula pasir:

- a. Jumlah konsumsi gula pasir yang lebih besar dari jumlah produksi maka pemerintah melakukan impor gula pasir untuk memenuhi kekurangan produksi agar kebutuhan gula pasir dapat terpenuhi. Kebijakan impor gula pasir tersebut diatur dalam Keperindag no. 230/MPP/kep/8/1999 mengenai pembebasan tarif impor gula untuk melindungi industri dalam negeri. Dalam hal pengaturan impor gula pemerintah menentukan importir yang dapat melakukan impor. Pihak yang dapat melakukan impor gula disebut Importir Terdaftar (IT). Kebijakan mengenai importir terdaftar termuat dalam Kepmenperindag no. 527/MPP/kep/9/2004. Dalam keputusan tersebut Importir Terdaftar wajib menyangga harga tingkat petani dan impor dilakukan bila harga minimum Rp. 3410,00. Importir Terdaftar (IT) untuk wilayah Sumatera adalah PTP. Nusantara VII (Persero) yang berdomisili di Bandar Lampung, dan juga PT. Rajawali Nusantara Indonesia (RNI).
- b. Pemerintah melakukan pengawasan dan evaluasi pasokan untuk mengantisipasi spekulasi pasar dan gejolak harga. Pemerintah juga bekerja sama dengan pihak terkait seperti produsen dan distributor untuk melakukan operasi pasar disaat terjadi gejolak harga yang terlampaui tinggi.

- c. Peningkatan kelancaran distribusi gula pasir ke daerah-daerah. Kegiatan yang dilakukan adalah dengan menyusun sistem pengawasan dan mekanisme distribusi ke daerah, koordinasi dan kerjasama dengan pemerintah Kabupaten/Kota dan asosiasi pengusaha dalam penyaluran gula pasir.



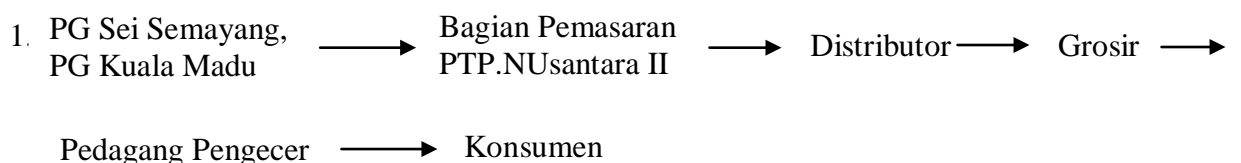
VI. PEMBAHASAN

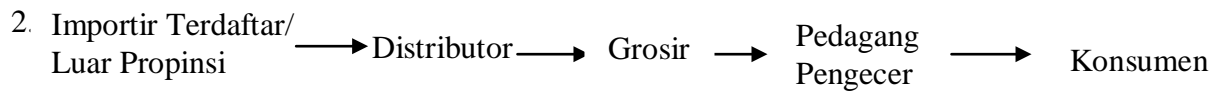
6.1. Saluran Tataniaga Gula Pasir di Daerah Penelitian

Dari hasil penelitian diperoleh bahwa gula pasir yang tersedia di Sumatera Utara berasal dari produksi Sumatera Utara sendiri, dari luar propinsi Sumatera Utara ataupun import. Gula pasir produksi daerah merupakan hasil produksi dari PTP. Nusantara II (Persero) yang memiliki dua pabrik gula (PG) yaitu PG Kuala Madu yang berdomisili di Kabupaten Langkat dan PG Sei Semayang yang berdomisili di Kabupaten Deli Serdang. Sedangkan untuk import gula harus melalui importir terdaftar. Untuk wilayah Sumatera terdapat beberapa importir terdaftar antara lain PTP. Nusantara VII yang berdomisili di Badar Lampung. Hal ini sesuai dengan Keputusan Menteri perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia nomor: 61/MPP/KEP/2/2004 tentang perdagangan antar pulau, impor gula pasir hanya dilakukan oleh importir terdaftar.

Gula pasir produksi PG Sei Semayang dan PG Kuala Madu, pemasarannya dilakukan oleh Kantor Direksi/Bagian Pemasaran PTP. Nusantara II(Persero) yang berdomisili di Tanjung Morawa. Sistem penjualannya dengan sistem tender. Peserta tender merupakan badan usaha yang berbadan hukum yang disebut distributor. Kemudian distributor menjual gula pasir tersebut ke grosir maupun pedagang pengecer di kabupaten/kota.

Adapun bentuk saluran tataniaga gula pasir di Sumatera utara adalah sebagai berikut:





Dari uraian diatas maka hipotesis 1 yang menyatakan bahwa saluran tataniaga di daerah penelitian terdiri dari produsen, agen, pedagang eceran dan konsumen secara deskriptif ditolak.

6.2. Jumlah Produksi dan Konsumsi Gula Pasir di Propinsi Sumatera Utara Tahun 2002-2006

6.2.1. Jumlah Produksi gula pasir di Sumatera Utara Tahun 2002-2005

Gula merupakan produk akhir dari dari pengolahan tebu yang terdapat dalam bahan kering yang tidak larut dalam nira. Produksi gula pasir Sumatera Utara merupakan produksi dari PG Sei Semayang dan PG Kuala Madu. Berdasarkan hasil penelitian Produksi gula pasir di Sumatera Utara selama tahun 2002-2005, secara rata-rata mengalami peningkatan. Data tersebut dapat dilihat dari lampiran 1a-1h dimana rata-rata pertumbuhan produksi gula meningkat sebesar 57,80 persen. Secara keseluruhan produksi gula pasir mengalami peningkatan, tetapi pada tahun 2002-2004 setiap tahunnya mengalami penurunan dimana rata-rata pertumbuhan produksi turun sebesar 32,79 persen setiap tahunnya. Penurunan produksi terbesar terjadi pada tahun 2004, dimana produksi turun 55,36 persen dari tahun sebelumnya atau turun 14.866,5 ton. Pada tahun 2005, produksi gula pasir meningkat 239 persen dari tahun sebelumnya atau naik 28.651,4 ton.

6.2.2. Jumlah Konsumsi Gula Pasir di Sumatera Utara

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh bahwa jumlah permintaan gula pasir sebagai konsumsi di Sumatera Utara setiap tahunnya bertambah. Pada tahun 2002, konsumsi gula pasir sebesar 135.760,48 Ton. Pada tahun 2003, konsumsi gula pasir naik 7,53 persen menjadi 145.987,04 Ton. Pada tahun 2004, kebutuhan gula pasir meningkat menjadi 154.495,19 Ton atau naik 5,83 persen dari tahun sebelumnya. Pada tahun 2005, konsumsi gula pasir meningkat cukup tinggi sebesar 0,65 persen yakni 155.223,68 Ton.

Rata-rata konsumsi gula pasir di Propinsi Sumatera Utara selama tahun 2002-2005 adalah 147.866,59 Ton dengan jumlah penduduk rata-rata sebesar 12.083.967 jiwa dengan rata-rata pertumbuhan konsumsi 4,67 persen pertahun. Peningkatan jumlah permintaan gula pasir disebabkan oleh meningkatnya jumlah penduduk. Hal ini sesuai dengan teori Pracoyo (2006) yang menyatakan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan yaitu: harga barang tersebut, jumlah pendapatan, harga barang komplementer, selera, iklan, jumlah penduduk. Semakin banyak jumlah anggota masyarakat atau penduduk maka akan meningkatkan permintaan suatu barang.

Maka berdasarkan uraian diatas maka hipotesis 2 yang menyatakan bahwa jumlah produksi dan konsumsi gula pasir per tahun di Sumatera Utara meningkat secara deskriptif diterima.

6.3. Hubungan Antara Supply/Penawaran Gula Pasir Dengan Harga Eceran Di Sumatera Utara

Supply/penawaran gula pasir di Sumatera Utara merupakan jumlah gula pasir yang dapat disalurkan ke pasar di setiap daerah. Jumlah gula yang disalurkan

merupakan jumlah total dari gula produksi PTP. Nusantara II (Persero), stok awal, dari propinsi lain dan impor. Dari data pada Tabel 8 dapat dilihat jumlah bahwa jumlah gula pasir yang ditawarkan setiap tahunnya meningkat. Pada tahun 2002 jumlah gula pasir yang ditawarkan 143569,90 ton. Pada tahun 2003 jumlah gula pasir yang tersedia 153960,92 ton. Pada tahun 2004 jumlah gula pasir yang tersedia sebesar 158858,90 ton. Pada tahun 2005 jumlah gula pasir yang ditawarkan 159500,11 ton. Jumlah gula pasir yang ditawarkan dipengaruhi oleh harga. Perkembangan rata-rata harga gula pasir di Sumatera Utara tahun 2002-2005 dapat dilihat pada Tabel 9. Dari Tabel 9 dapat dilihat bahwa harga gula pasir setiap tahunnya meningkat. Pada tahun 2002, harga rata-rata gula pasir sebesar 3474,49 rupiah. Pada tahun 2003, harga rata-rata gula pasir meningkat 22,72 persen atau meningkat menjadi 4263,92 rupiah. Pada tahun 2004, harga rata-rata gula pasir mengalami penurunan cukup kecil sebesar 0,55 persen. Sedangkan pada tahun 2005, harga rata-rata gula meningkat cukup tinggi menjadi 6272,64 rupiah atau meningkat 47,92 persen dari tahun sebelumnya. Dari uraian jumlah barang yang ditawarkan dipengaruhi oleh harga barang tersebut. Hal ini sesuai dengan teori Joesron dan Fathorrozi (2003) yang menyatakan bahwa hukum penawaran menjelaskan hubungan antara harga suatu barang dengan jumlah penawaran barang tersebut. Makin tinggi harga suatu barang, makin banyak jumlah barang tersebut yang ditawarkan oleh penjual dan begitu sebaliknya.

Maka berdasarkan uraian diatas hipotesis 3, yang menyatakan bahwa Bila harga eceran meningkat maka jumlah *supply*/penawaran gula pasir juga meningkat, secara deskriptif diterima.

6.4. Peran Pemerintah Dan Lembaga Swasta Dalam Penyaluran Gula Pasir Di Propinsi Sumatera Utara

Tataniaga merupakan pemasaran atau pendistribusian komoditi. Peranan pemerintah dan lembaga swasta memberikan kemudahan dalam pendistribusian gula pasir ke konsumen akhir. Peranan pemerintah dalam penyaluran gula pasir adalah dengan mengontrol alokasi pendistribusian gula pasir yang berimbang dengan konsumsi gula pasir untuk setiap Kabupaten/Kota. Disamping itu pemerintah juga melakukan regulasi pasar yang tercermin dari harga. Salah satu usaha yang dilakukan pemerintah untuk mengontrol tataniaga gula pasir melalui penetapan harga eceran tertinggi untuk komoditi ini adalah Rp 6.200,00 per kg. Sedangkan harga pokok yang harus ditanggung oleh pabrik untuk memproduksi gula pasir per kilogram adalah Rp 5.400,00. Untuk menjaga agar harga gula pasir di tingkat konsumen tetap berada pada harga yang ditetapkan pemerintah maka pada saat terjadi kelangkaan komoditi ini, pemerintah melakukan operasi pasar. Hal ini sesuai dengan teori Sunaryo (2001) Pemerintah sering meregulasi pasar. Dampak dari regulasi selalu akan tercermin di harga. Salah satu tujuan pemerintah melakukan regulasi adalah mentransfer pendapatan dari kelompok ekonomi yang satu ke yang lain. Selain transfer pendapatan, pemerintah meregulasi pasar untuk meningkatkan efisiensi kinerja pasar. Disamping itu lembaga swasta juga memiliki perananan penting dalam tataniaga gula pasir. Dalam hal ini lembaga swasta berperan sebagai distributor yang menyalurkan gula pasir sehingga sampai ke konsumen akhir. Sebagai distributor dan perantara pemasaran maka lembaga swasta melakukan fungsi-fungsi tataniaga. Hal ini sesuai dengan teori Winardi (1989) yang menyatakan Lembaga tataniaga/pemasaran melakukan fungsi tataniaga yang meliputi kegiatan: fungsi

pertukaran, fungsi pengadaan/penyediaan, fungsi pemberian fasilitas. Fungsi-fungsi tataniaga tersebut dilakukan oleh lembaga-lembaga tataniaga untuk mempermudah dalam penyampaian komoditi yang dibutuhkan oleh konsumen. Maka hipotesis 4 secara deskriptif diterima.

6.5. Upaya-Upaya Yang Dilakukan Pemerintah Untuk Memecahkan Masalah Tataniaga Gula Pasir

Upaya-paya yang dapat dilakukan pemerintah untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi dalam tataniaga gula pasir:

- a. Jumlah konsumsi gula pasir yang lebih besar dari jumlah produksi maka pemerintah melakukan impor gula pasir untuk memenuhi kekurangan produksi agar kebutuhan gula pasir dapat terpenuhi. Dalam hal pengaturan impor gula pemerintah menentukan importir yang dapat melakukan impor. Impor yang dapat melakukan impor gula disebut Importir Terdaftar (IT). Importir Terdaftar (IT) untuk wilayah Sumatera adalah PTP. Nusantara VII (Persero) yang berdomisili di Bandar Lampung, dan juga PT. Rajawali Nusantara Indonesia (RNI).
- b. Pemerintah melakukan pengawasan dan evaluasi pasokan untuk menantisipasi spekulasi pasar dan gejolak harga. Pemerintah juga bekerja sama dengan pihak terkait seperti produsen dan distributor untuk melakukan operasi pasar disaat terjadi gejolak harga yang terlampaui tinggi.
- c. Peningkatan kelancaran distribusi gula pasir ke daerah-daerah. Kegiatan yang dilakukan adalah dengan menyusun sistem

pengawasan dan mekanisme distribusi ke daerah, koordinasi dan kerjasama dengan pemerintah Kabupaten/Kota dan asosiasi pengusaha dalam penyaluran gula pasir.

Hal ini sesuai dengan teori Gultom (1996) yang menyatakan bahwa Upaya-upaya perbaikan sistem tataniaga dilakukan oleh semua pihak yang terkait.

Upaya-upaya itu antara lain:

1. produsen harus dapat mengetahui dengan baik saluran tataniag yang ditempuh, juga tantang informasi pasar pada saat produsen mempunyai hasil untuk dijual.
2. lembaga tataniaga dapat melakuakn integrasi sehingga biaya total tataniaga barang dapat dikurangi dan keuntungan lembaga tataniaga yang melakukan integrasi lebih besar
3. konsumen dalam hal ini dilakukan usaha perbaikan dengan jalan pendidikan terhadap konsumen
4. pemerintah, hal-hal yang dapat dilakukan yakni pengadaan pengawasan seperti mengeluarkan peraturan, perbaikan fasilitas tataniaga dan perbaikan alat-alat komunikasi.

VII. KESIMPULAN DAN SARAN

7.1. Kesimpulan

1. Bentuk saluran tataniaga gula pasir di daerah penelitian ada 2 macam yaitu:
 - a. PG Sei Semayang dan PG Kuala Madu → Bagian Pemasaran PTP Nusantara II (Persero) → Distributor → Grosir → Pedagang Pengecer → Konsumen.
 - b. Importir Terdaftar/Luar → Distributor → Grosir → Pedagang Pengecer → Konsumen.
2. Jumlah produksi gula pasir di Sumatera Utara selama tahun 2002-2005 mengalami peningkatan. Jumlah produksi rata-rata gula pasir adalah 27.345,96 ton dengan tingkat pertumbuhan rata-rata 57,80 persen. Jumlah konsumsi gula pasir lebih besar dari pada jumlah produksi gula pasir. Disamping itu setiap tahunnya terjadi peningkatan konsumsi gula pasir. Rata-rata peningkatan konsumsi gula pasir selama tahun 2002-2005 adalah 147.866,59 ton dengan tingkat pertumbuhan konsumsi 4,67 persen.
3. Dari segi harga juga mengalami peningkatan setiap tahunnya. Peningkatan harga terbesar dalam kurun waktu 2002-2005 adalah pada tahun 2005. Dimana peningkatan yang terjadi sebesar 47,92 persen dari tahun sebelumnya, harga rata-rata gula pasir menjadi 6272,64s rupiah.
4. Peran pemerintah dan lembaga swasta dalam tataniaga gula pasir adalah dengan melakukan pengadaan gula pasir di daerah-daerah Kabupaten/Kota dan melakukan kontrol dalam hal pengalokasian gula pasir sesuai kebutuhan daerah.

5. Masalah yang dihadapi dalam tataniaga gula terdiri dari masalah pengadaan dan pendistribusian. Kebijakan yang dilakukan pemerintah antara lain kebijakan peningkatan kapasitas produksi, pengembangan distribusi dan akses tataniaga.

7.2. Saran

1. Meningkatkan produksi gula pasir dengan peningkatan produksi bahan baku tebu dan melakukan pengremajaan pabrik gula agar kinerja pabrik dapat ditingkatkan sehingga jumlah impor gula pasir dapat dikurangi.
2. Meningkatkan distribusi antar daerah dengan memperlancar sarana dan prasarana transportasi
3. Dalam mengantisipasi gejolak harga dan spekulasi pasar pemerintah harus meningkatkan pengawasan dan evaluasi dengan melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah Kabupaten/Kota dan asosiasi pengusaha.

DAFTAR PUSTAKA

- Daniel, M., 2002. Pengantar Ekonomi Pertanian. Bumi Aksara. Jakarta
- Gultom, H., 1996. Tataniaga Pertanian. Universitas Sumatera Utara Press. Medan
- Hadikoeworo, H., 1986. Penelitian Ekonomi Budidaya Perairan di Asia. PT. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta
- Joesron, T. S., dan Fathorrozi, 2003. Teori Ekonomi Mikro. Salemba Empat. Jakarta
- Lubis, S., 2002. Teknik Pengambilan Sampel. Universitas Sumatera Utara Press. Medan
- Mubyarto, 1989. Pengantar Ekonomi Pertanian. LP3ES. Jakarta
- Musrid, 1993. Manajemen Pemasaran. Bumi aksara. Jakarta
- Radiosunu, 1995. Konsep Sistem dan Fungsi Pemasaran. Fakultas Ekonomi-Universitas Gajah Mada. Yogyakarta
- Saladin, D., 1996. Unsur-Unsur Inti Pemasaran dan Manajemen Pemasaran. Mandar Maju. Bandung
- Sanusi, B., 2003. Ekonomi Mikro. Universitas Trisakti. Jakarta
- Soekartawi, 1991. Agribisnis Teori dan Aplikasinya. Rajawali. Jakarta
- _____, 1993. Agribisnis Teori dan Aplikasinya. Rajawali. Jakarta
- _____, 2002. Prinsip Dasar Manajemen Pemasaran Pertanian Teori dan Aplikasinya. Rajawali. Jakarta
- Sudana, W., P. Simatupang, S. Friyanto, C. Muslim, dan T. Soelityo, 2000. Dampak Regulasi Industri Gula Terhadap Realokasi Sumber Daya, Produksi Pangan, dan Pendapatan Petani. Pusat Penelitian Social Ekonomi Pertanian. Bogor
- Sudiyono, A., 2004. Pemasaran Pertanian. Universitas Muhammadiyah Malang Press. Malang
- Sugiarto, D. Siagian, L. T. Sunaryanto, D. S. Oetomo, 2001. Teknik Sampling. PT. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta

- Sunaryo, T., 2001. *Ekonomi Manajerial: Aplikasi Teori Ekonomi Mikro*. Erlangga. Jakarta
- Susila, W. R., Nahdodin, dan A.H. Malian. Prospek Dan Arah Pengembangan Industri berbasis Tebu. [www.Ipard.Com/art_perkebunan/5 desember 2005](http://www.Ipard.Com/art_perkebunan/5%20desember%202005)
- Tim Penulis, 1992. *Pembudidayaan Tebu di Lahan Sawah Tegalan*. Penebar Swadaya. Jakarta
- Tjokroadikoesoemo, P.S. dan A.S. Baktir, 1984. *Ekstrasi Nira Tebu*. YPI Sekolah Tinggi Teknologi Industri. Surabaya
- Ull, J. N. and Richard L. Khols, 1980. *Marketing of Agricultural Product*. Macmillan. United State
- Winardi, 1989. *Aspek-Aspek Bauran Pemasaran (Marketing Mix)*. Mandar Maju. Bandung
- www.pemprovsumut.go.id/lengkap. PTPN II Panen 1,041 Juta Ton Tebu Pada Januari 2006
- www.kompas.com/kom_cc/2002. Produksi Tebu SUMUT Tak Mencukupi Kebutuhan Gula
- <http://warintek.progressio.or.perkebunan>. Tebu